BNPB

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

Kerangka Kerja Sendai
untuk Pengurangan Risiko Bencana
2015 - 2030

Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction
2015-2030

Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2015

Kerangkakerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030

Hasil yang diharapkan

Sampai dengan 15 tahun: Pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana

Tujuan

Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko	Mencegah & menurunkan keterpaparan dan kerentanan	Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan

Target

Mengurangi # kematian rata2 per 100K	Mengurangi # orang terdampak rata2 per 100 K	Mengurangi # kerugian ekonomi / GDP	Mengurangi # kerusakan infastruktur kunci	Meningkatkan jumlah negara dengan strategi dan rencana PRB	Meningkatkan kerjasama internasional	Meningkatkan # cakupan dan akses terhadap EWS

Tindakan Prioritas

1. Memahami risiko bencana	2. Penguatan tata kelola risiko	3. Investasi PRB untuk Resiliensi	4. Meningkatkan manajemen risiko
Kebijakan dan praktek harus didasarkan pada pemahaman kerentanan, kapasitas, aparan,karakteristik bahaya dan lingkungan	*Tata kelola yang diperlukan untuk mendorong kerjasama kemitraan mekanisme, lembaga, untuk pelaksanaan PRB & SD*	*Investasi publik dan swasta dalam tindakan struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja*	*Memperkuat kesiapsiagaan, respon dan pemulihan di semua tingkatan sebagai kesempatan penting untuk PRB dan integrasinya ke dalam pembangunan*
• Mendorong pengumpulan, manajemen dan akses ke informasi risiko • Gunakan dasar, data berbasis lokasi • Statistik kerusakan & kerugian • Mengoptimalkan IPTEK • Meningkatkan kesadaran • Gunakan informasi risiko untuk kebijakan pembangunan & PRB	• Mengarusutamakan & mengintegrasikan PRB di semua sektor • Mengadopsi strategi, rencana, peran tugas • Menetapkan insentif bagi kepatuhan, pemantauan & pelaporan • Memberdayakan daerah • Mempromosikan kebijakan, standar, kemitraan	• Mengalokasikan sumber daya untuk semua tingkatan dan sektor • Meningkatkan infrastruktur kritis • Mempromosikan tindakan-tindakan non-struktural, misalnya standar, kesehatan, jaring pengaman sosial, pengungsian • Mengintegrasikan PRB dalam instrumen fiskal & keuangan dan menggali risk sharing & Transfer • Meningkatkan ketahanan bisnis • Melindungi mata pencaharian, pariwisata, dll	• Kesiapan dan kebijakan, rencana, program • People-centred multi-hazard, ramalan & EWS • Mempromosikan ketahanan masyarakat, layanan infrastruktur • Bantuan & pemulihan pendanaan, koordinasi, prosedur • Mengembangkan hukum, panduan, prosedur, mekanisme

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

I. Preamble

1. The present post-2015 framework for disaster risk reduction was adopted at the Third World Conference on Disaster Risk Reduction, held from 14 to 18 March 2015 in Sendai, Miyagi, Japan, which represented a unique opportunity for countries to:

(a) Adopt a concise, focused, forward-looking and action-oriented post-2015 framework for disaster risk reduction;

(b) Complete the assessment and review of the implementation of the Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building Resilience of Nations and Communities to Disasters;[1]

(c) Consider the experience gained through the regional and national strategies/institutions and plans for disaster risk reduction and their recommendations, as well as relevant regional agreements under the implementation of the Hyogo Framework for Action;

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030

I. Pembukaan

1. Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pasca 2015 telah diadopsi pada saat penyelenggaraan Konferensi Dunia ke-3 untuk Pengurangan Risiko Bencana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang, yang merepresentasikan kesempatan yang unik bagi seluruh negara untuk:

(a) Mengadadopsi secara ringkas, terfokus, melihat kedepan, dan mengambil tindakan yang berorientasi pada kerangka pengurangan risiko bencana pasca 2015;

(b) Melengkapi penilaian dan review terhadap pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo 2005 - 2015: Membangun ketangguhan bangsa dan komunitas terhadap bencana;[1]

(c) Mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh melalui strategi/kembaga regional dan nasional serta perencanaan pengurangan risiko bencana dan rekomendasinya, sebagai kesepakatan regional yang relevan dalam pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo;

[1] A/CONF.206/6 and Corr.1, chap. I, resolution 2.

(d) Identify modalities of cooperation based on commitments to implement a post-2015 framework for disaster risk reduction;

(e) Determine modalities for the periodic review of the implementation of a post-2015 framework for disaster risk reduction.

2. During the World Conference, States also reiterated their commitment to disaster risk reduction and the building of resilience[2] to disasters to be addressed with a renewed sense of urgency in the context of sustainable development and poverty eradication and, as appropriate, to be integrated into policies, plans, programmes, and budgets at all levels and considered within relevant frameworks.

(d) Mengidentifikasi modalitas kerjasama berdasarkan komitmen untuk menerapkan kerangka kerja pengurangan risiko bencana pasca - 2015;

(e) Menentukan modalitas untuk melakukan review secara periodik terhadap pelaksanaan kerangka pengurangan risiko bencana pasca - 2015.

2. Selama Konferensi Dunia, Negara-negara peserta juga menegaskan komitmen mereka untuk pengurangan risiko bencana dan pembangunan ketahanan[2] bencana yang harus ditangani secara serius dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dan, jika perlu, untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan, program kerja, dan anggaran di semua tingkat dan dipertimbangkan dalam kerangka yang relevan.

[2] "Ketahanan dijelaskan sebagai: "Kemampuan sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang terpapar hazard untuk melawan, menyerap, mengakomodasi dan memulihkan diri dari dampak suatu bahaya secara cepat dan efisien, termasuk melestarikan dan memulihkan struktur dan fungsi dasar yang penting", United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), "2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction", Geneva, May 2009 (http://www.unisdr.org/we/inform/terminology).

Resilience is defined as: "The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and functions", United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), "2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction", Geneva, May 2009 (http://www.unisdr.org/we/inform/terminology)

The Hyogo Framework for Action: lessons learned, gaps identified and future challenges

3. Since the adoption of the Hyogo Framework for Action in 2005, as documented in national and regional progress reports on its implementation as well as in other global reports, progress has been achieved in reducing disaster risk at local, national, regional and global levels by countries and other relevant stakeholders, leading to a decrease in mortality in the case of some hazards. [3] Reducing disaster risk is a cost effective investment in preventing future losses. Effective disaster risk management contributes to sustainable development. Countries have enhanced their capacities in disaster risk management. International mechanisms for strategic advice, coordination and partnership development

Kerangka Aksi Hyogo: pembelajaran, mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan kedepan

3. Sejak penerapan Kerangka Aksi Hyogo pada tahun 2005, yang didokumentasikan dalam laporan kemajuan nasional dan regional dalam pelaksanaannya serta laporan global lainnya, kemajuan telah dicapai dalam mengurangi risiko bencana di tingkat lokal, nasional, regional dan global dengan negara-negara dan pihak terkait lainnya, yang mengarah ke penurunan angka kematian dalam kasus beberapa ancaman.[3] Mengurangi risiko bencana merupakan investasi dengan biaya yang efektif dalam mencegah kehilangan dimasa depan. Manajemen risiko bencana yang efektif memberikan sumbangan untuk pembangunan berkelanjutan. Negara mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam manajemen risiko bencana. Mekanisme internasional sebagai sarana untuk

[3] Hazard didefinisikan dalam Kerangka Aksi Hyogo sebagai: "Sebuah peristiwa fisik, fenomena atau aktivitas manusia yang memiliki potensi merusak yang menyebabkan kehilangan nyawa atau cedera, kerusakan harta benda, struktur. Hazard bisa meliputi kondisi laten yang mewakili ancaman dimasa datang dan bisa berasal dari sumber berbeda: alami (geologi, hidrometerologi, dan biologi) atau disebabkan oleh manusia (degradasi lingkungan dan bahaya tekhnologi).
Hazard is defined in the Hyogo Framework for Action as: "A potentially damaging physical event, phenomenon or human activity that may cause the loss of life or injury, property damage, social and economic disruption or environmental degradation. Hazards can include latent conditions that may represent future threats and can have different origins: natural (geological, hydrometeorological and biological) or induced by human processes (environmental degradation and technological hazards).

for disaster risk reduction, such as the Global Platform for Disaster Risk Reduction and the regional platforms for disaster risk reduction, as well as other relevant international and regional forums for cooperation have been instrumental in the development of policies and strategies and the advancement of knowledge and mutual learning. Overall, the Hyogo Framework for Action has been an important instrument for raising public and institutional awareness, generating political commitment and focusing and catalysing actions by a wide range of stakeholders at all levels.

4. Over the same 10-year time frame, however, disasters have continued to exact a heavy toll, and as a result the well-being and safety of persons, communities and countries as a whole have been affected. Over 700 thousand people lost their lives, over 1.4 million were injured and approximately 23 million were made homeless as a result of disasters. Overall, more than 1.5 billion people were affected by disasters in various ways. Women, children and people in vulnerable situations were disproportionately affected. The total

memperoleh saran strategis, koordinasi dan pengembangan kemitraan untuk pengurangan risiko bencana, seperti Global Platform dalam Pengurangan Risiko saster dan regional platform untuk pengurangan risiko bencana, serta forum-forum internasional dan regional yang relevan lainnya untuk kerjasama telah berperan dalam pengembangan kebijakan dan strategi dan kemajuan pengetahuan dan saling belajar. Secara keseluruhan, Kerangka Aksi Hyogo telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran publik dan kelembagaan, menghasilkan komitmen politik dan terfokus pada tindakan-tindakan katalis yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di semua tingkat.

4. Selama kurun waktu 10 tahun, bagaimanapun, bencana besar tetap berlanjut, dan menghasilkan individu yang lebih baik dan lebih aman, komunitas dan negara terpengaruh secara keseluruhan. Lebih dari 700 ribu orang yang kehilangan nyawanya, lebih dari 1,4 juta orang yang cedera dan sekitar 23 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Secara keseluruhan, lebih dari 1,5 milyar orang terdampak bencana dengan berbagai cara. Perempuan, anak-anak dan kelompok rentan terdampak secara tidak proporsional. Total

economic loss was more than $1.3 trillion. In addition, between 2008 and 2012, 144 million people were displaced by disasters. Disasters, many of which are exacerbated by climate change and increasing in frequency and intensity, significantly impede progress towards sustainable development. Evidence indicates that exposure of persons and assets in all countries has increased faster than vulnerability[4] has decreased, thus generating new risk and a steady rise in disasters losses with a significant economic, social, health, cultural and environmental impact in the short, medium and long term, especially at the local and community level. Recurring small-scale disasters and slow-onset disasters particularly affect communities, households and small and medium-sized enterprises and constitute a high percentage of all losses. All countries — especially developing countries where the mortality and economic losses from disasters are disproportionately higher — are faced with increasing levels of possible

kerugian secara ekonomi lebih dari 1.3 trilyun dolar. Ditambahm antara tahun 2008 dan 2014, 144 juta orang harus diungsikan akibat bencana. Bencana, yang banyak diantaranya disebabkan oleh perubahan iklim dan peningkatan frekuensi serta intensitas, secara secara bertahap cukup signifikan progresnya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Bukti menunjukkan bahwa orang dan aset yang terekspose di seluruh negara secara cepat meningkat kerentanannya[4] telah menurun, selanjtnya risiko generasi baru telah memunculkan kerugian akibat bencana secara signifikan berdampak terhadap ekonomi, soaial, kesehatan, budaya dan lingkungan dalam waktu jangka pendek, menengah dan jangka panjang, khususnya ditingkat lokal dan komunitas. Pemulihan bencana skala kecil dan bencana yang berlangsung secara perlahan secara khusus berdampak pada komunitas, rumah tangga dan usaha skala kecil - menegah dan menciptakan kerugian dalam presentasi yang cukup tinggi -- terutama negara berkembang dimana angka kematian dan kerugian ekonomi akibat bencana cukup

[4] Kerentanan didefinisikan dalam Kerangka Aksi Hyogo sebagai: " Kondisi yang ditentukan oleh faktor atau proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan, yang meningkatkan masyarakat secara mudah terpengaruh oleh dampak suatu hazard".
Vulnerability is defined in the Hyogo Framework for Action as: "The conditions determined by physical, social, economic and environmental factors or processes, which increase the susceptibility of a community to the impact of hazards".

hidden costs and challenges to meet financial and other obligations.

5. It is urgent and critical to anticipate, plan for and reduce disaster risk in order to more effectively protect persons, communities and countries, their livelihoods, health, cultural heritage, socioeconomic assets and ecosystems, and thus strengthen their resilience.
6. Enhanced work to reduce exposure and vulnerability, thus preventing the creation of new disaster risks, and accountability for disaster risk creation are needed at all levels. More dedicated action needs to be focused on tackling underlying disaster risk drivers, such as the consequences of poverty and inequality, climate change and variability, unplanned and rapid urbanization, poor land management and compounding factors such as demographic change, weak institutional arrangements, non-risk-informed policies, lack of regulation and incentives for private disaster risk reduction investment, complex supply chains, limited availability of technology, unsustainable uses of natural resources, declining ecosystems, pandemics and epidemics. Moreover, it is necessary to continue strengthening good governance in disaster risk reduction at

tinggi -- berhadapan dengan peningkatan kemungkinan biaya dan tantangan yang tidak nampak secara finansial dan kewajiban lainnya.

5. Hal ini sangat penting dan kritis untuk diantisipasi, rencana untuk dan mengurangi risiko bencana untuk melindungi orang, komunitas dan negara secara efektif, terkait dengan aspek kehidupan, kesehatan, budaya yang dilindungi, aset sosial ekonomi dan ekosistem, serta memperkuat ketangguhan mereka.
6. Meningkatkan kerja-kerja untuk mengurangi keterpaparan dan kerentangan, sekaligus mencegah munculnya bentuk risiko bencana yang baru, dan akuntabilitas untuk pemunculan risiko bencana dibutuhkan disemua tingkatan. Membutuhkan aksi-aksi yang lebih didedikasikan agar terfokus pada menangkal faktor-faktor risiko mendasar yang mempengaruhi, seperti konsekuensi kemskinan dan ketidaksetaraan, perubaan iklim dan variannya, urbanisasi yang masif dan tiperaturan dak terencana, faktor-fakrot manajemen lahan dan pemukiman yang rendah seperti perubahan demografi, pengaturan kelembagaan yang lemah, kebijakan yang minim informasi risikonya, peraturan yang tidak jalan dan insentif

the national, regional and global levels and improving preparedness and national coordination for disaster response, rehabilitation and reconstruction, and to use post-disaster recovery and reconstruction to "Build Back Better" supported by strengthened modalities of international cooperation.

7. There has to be a broader and a more people-centred preventive approach to disaster risk. Disaster risk reduction practices need to be multi-hazard and multisectoral based, inclusive and accessible in order to be efficient and effective. While recognizing their leading, regulatory and coordination role, Governments should engage with relevant stakeholders, including women, children and youth, persons with disabilities, poor people, migrants, indigenous peoples, volunteers, the community of practitioners and older persons in the design and implementation of policies, plans and standards. There is a need for the public and private sectors and civil society organizations, as well as academia and scientific and research institutions, to work more closely together and to create

terkait investasi swasta dalam pengurangan risiko bencana, rantai distribusi yang kompleks, keterbatasan teknologi, penggunaan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan, penurunan ekosistem, pandemi dan epidemi. Lebih lanjut, hal ini perlu untuk melanjutkan penguatan tata kelola yang baik dalam penguranga risiko bencana pada tingkat nasional, regional dan global serta meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi nasional dalam respon bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan memanfaatkan pemulihan pasca bencana dan rekonstruksi untuk mendukung " membangun kembali dengan lebih baik" melalui penguatan modalitas kerjasama internasional.

7. Harus ada pendekatan yang lebih luas dengan pendekatan yang lebih terpusat pada manusia dalam pencegahan risiko bencana. Praktik pengurangan risiko bencana harus berbasis multi-hazard dan multisektor, inklusif dan dapat diakses secara efisien dan efektif. Sementara mengenali pemangku utama, peraturan dan perannya dalam koordinasi, Pemerintah harus menggandeng stakeholder yang relevan, termasuk kelompo perempuan, anak dan pemuda, orang dengan kebutuhan khusus, kelompok miskin,

opportunities for collaboration, and for businesses to integrate disaster risk into their management practices.

8. International, regional, subregional and transboundary cooperation remains pivotal in supporting the efforts of States, their national and local authorities as well as communities and businesses to reduce disaster risk. Existing mechanisms may require strengthening in order to provide effective support and achieve better implementation. Developing countries, in particular the least developed countries, small island developing States, landlocked developing countries and African countries, as well as middle-income countries facing specific challenges, need special attention and support to augment domestic resources and capabilities through bilateral and multilateral channels to ensure adequate, sustainable, and timely means of implementation in capacity-building, financial and technical assistance and technology transfer, in accordance with international commitments.

pekerja migran, masyarakat adat, relawan, serta para praktisi dan lanjut usia dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan, perencanaan dan standar. Ada kebutuhan dari sektor privat dan swasta serta masyarakat sipil seperti akademisi, ilmuwan dan lembaga penelitian untuk bekerja erat bersama-sama untuk menciptakan peluang-peluang untuk kolaborasi, dan bagi kelompok bisnis untuk mengintegrasikan risiko bencana dalam praktik manajemennya.

8. Kerjasama internasional, regional, sub-regional dan lintas negara tetap penting dalam mendukung negara, otoritas nasional serta masyarakat lokal dan dunia usaha untuk mengurangi risiko bencana. Mekanisme yang sudah terbangun mungkin perlu diperkuat dalam memberikan dukungan yang efektif dan implementasi yang lebih baik. Negara-negara berkembang, khususnya negara yang sudah berkembang, negara kepulauan yang sedang berkembang, negara berkembang yang berada ditengah benua dan negara-negara Afrika, serta negara-negara berkembang dengan pendapatan menengah menghadapi tantangan khusus, butuh perhatian khusus dan dukungan untuk meningkatkan sumber daya dan

9. Overall, the Hyogo Framework for Action has provided critical guidance in efforts to reduce disaster risk and contributed to the progress towards the achievement of the Millennium Development Goals. Its implementation has, however, highlighted a number of gaps in addressing the underlying disaster risk factors, in the formulation of goals and priorities for action,[5] in the need to foster disaster resilience at all levels and in ensuring adequate means of implementation. The gaps indicate a need to develop an action-oriented framework that Governments and relevant stakeholders can implement in a supportive and complementary manner, and which helps to identify disaster risks to be managed and guides investment to improve resilience.

kemampuan dalam negeri melalui jalur-jalur bilateral dan multilateral untuk memastikan sarana yang memadai, berkelanjutan dan pelaksanaan yang tepat waktu dalam pengembangan kapasitas, finansial dan serta bantuan teknis dan transfer tekhnologi, sesuai dengan komitmen internasional.

9. Secara keseluruhan, Kerangka Aksi Hyogo telah memberikan petunjuk penting dalam upaya mengurangi risiko bencana dan berkontribusi dalam kemajuan capaian tujuan pembangunan milenium. Dalam pelaksanaannya, menyoroti sejumlah kesenjangan dalam mengatasi faktor-faktor mendasar risiko bencana, dalam memformulasikan tujuan dan prioritas aksi,[5] yang dibutuhkan untuk mendorong ketangguhan bencana disemua tingkat dan dalam memastikan sarana implementasi yang memadai. Kesenjangan yang ada menunjukkan adanya kebutuhan untuk

[5] Prioritas Kerangka Aksi Hyogo 2005 - 2015 adalah: (1) memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional dan lokal yang berbasis pada kelembagaan yang kuat dalam implemebtasinya; (2) mengidentifikasi, mengkaji dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini; (3) memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya aman dan ketangguhan di semua tingkatan; (4) mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar; dan (5) memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif di semua tingkatan.
The Hyogo Framework priorities for action 2005-2015 are: (1) ensure that disaster risk reduction is a national and a local priority with a strong institutional basis for implementation; (2) identify, assess and monitor disaster risks and enhance early warning; (3) use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience at all levels; (4) reduce the underlying risk factors; and (5) strengthen disaster preparedness for effective response at all levels.

10. Ten years after the Hyogo Framework for Action, disasters continue to undermine efforts to achieve sustainable development.

11. The intergovernmental negotiations on the post-2015 development agenda, financing for development, climate change and disaster risk reduction provide the international community with a unique opportunity to enhance coherence across policies, institutions, goals, indicators, and measurement systems for implementation, while respecting their respective mandates. Ensuring credible links, as appropriate, between these processes will contribute to building re silience and achieving the global goal to eradicate poverty.

12. It is recalled that the outcome of the UN Conference on Sustainable Development 2012, "The Future We Want", which called

mengembangkan kerangka kegiatan yang berorientasi bahwa Pemerintah dan stakeholder yang relevan dalam pelaksanaannya mampu untuk saling mendukung dan melengkapi, dan membantu untuk mengidentifikasi risiko bencana yang bisa dikelola dan memberikan panduan investasi untuk meningkatkan ketangguhhan.

10. Setelah sepuluh tahun berlakunya Kerangka Aksi Hyogo, bencana masih terus merusak upaya-upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
11. Negosiasi antar pemerintah pada agenda pembangunan pasca 2015 terkait, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana memberikan kesempatan yang unik bagi komunitas internasional untuk memadukan seluruh kebijakan, institusi, tujuan, indikator, dan sistem pengukuran dalam implementasi, disamping menghormati mandat mereka masing-masing. Memastikan keterkaitan yang kredibel, sesuai, antara proses tersebut dan akan berkontribusi dalam membangun ketangguhan dan mencapai tujuan global untuk memberantas kemiskinan.
12. Hal ini mengingatkan hasil dari Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan

for disaster risk reduction and building of resilience to disasters to be addressed with a renewed sense of urgency in the context of sustainable development and poverty eradication and, as appropriate, to be integrated at all levels. The Conference also reaffirms all the principles of the Rio Declaration on Environment and Development.

13. Addressing climate change as one of the drivers of disaster risk, while respecting the mandate of the United Nations Framework Convention on Climate Change[6], represents an opportunity to reduce disaster risk in a meaningful and coherent manner throughout the inter-related intergovernmental processes.

14. Against this background, and in order to reduce disaster risk, there is a need to address existing challenges and prepare for future ones by focusing on: monitoring, assessing and understanding disaster risk and sharing such information and how it is

2012, "The Future We Want", yang menyerukan pengurangan risiko bencana dan membangun ketangguhan terhadap bencana yang harus ditangani dengan memperbarui pentingnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, dan diintegrasikan di semua tingkatan. Konferensi ini juga menegaskan semua prinsip-prinsip dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan.

13. Perubahan iklim merupakan salah satu pendorong risiko bencana, dengan menghormati mandat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim,[6] merupakan peluang untuk mengurangi risiko bencana secara bermakna dan koheren melalui proses antar pemerintah yang saling terkait.

14. Dibalik latar belakang tersebut, dan untuk mengurangi risiko bencana, ada kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang ada dan mempersiapkan diri di masa depan dengan fokus pada: monitoring, menilai dan memahami risiko bencana dengan berbagi

[6] Isu-isu perubahan iklim yang disebutkan dalam kerangka ini masih dalam mandat PBB. Konvensi Kerangka KErja Perubahan Iklim di bawah kompetensi para pihak di konvensi tersebut.
The climate change issues mentioned in the present framework remain within the mandate of the United Nations Framework Convention on Climate Change under the competences of the Parties to the Convention.

created; strengthening disaster risk governance and coordination across relevant institutions and sectors and the full and meaningful participation of relevant stakeholders at appropriate levels; investing in the economic, social, health, cultural and educational resilience of persons, communities and countries and in the environment, also through technology and research; enhancing multi-hazard early warning systems, preparedness, response, recovery, rehabilitation and reconstruction. To complement national action and capacity, there is a need to enhance international cooperation between developed and developing countries and between States and international organizations.

15. The present framework will apply to the risk of small-scale and large-scale, frequent and infrequent, sudden and slow-onset disasters, caused by natural or manmade hazards as well as related environmental, technological and biological hazards and risks. It aims to guide the multi-hazard management of disaster risk in development at all levels as well as within and across all sectors.

informasi dan bagaimana hal tersebut tercipta; memperkuat tata kelola risiko bencana dan koordinasi antar instansi dan sektor terkait serta partisipasi penuh dan bermakna dari para stakeholder yang relevan pada tingkatan yang tepat; investasi di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, budaya dan pendidikan ketangguhan dari individu-individu, komunitas dan negara serta lingkungan, juga melalui teknologi dan penelitian; meningkatkan sistem peringatan dini yang multi-hazard, kesiapsiagaan, respon, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk melengkapi tindakan dan kapasitas nasional, ada kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama internasional antara negara maju dan berkembang, serta antara negara dan organisasi internasional.

15. Kerja ini akan berlaku untuk risiko dengan skala kecil dan besar, sering dan jarang terjadi, yang datang secara tiba-tiba maupun lambat, yang disebabkan oleh alam atau hazard yang disebabkan oleh manusia serta risiko yang berhubungan dengan lingkungan, teknologi dan biologi. Hal ini bertujuan untuk manjadi panduan pengelolaan risiko bencana yang multi-hazard dalam pembangunan pada semua tingkatan dan lintas sektoral.

II. Expected outcome and goal

16. While some progress in building resilience and reducing losses and damages has been achieved, a substantial reduction of disaster risk requires perseverance and persistence, with a more explicit focus on people and their health and livelihoods, and regular follow-up. Building on the Hyogo Framework for Action, the present framework aims to achieve the following outcome over the next 15 years:

    The substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods and health and in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of persons, businesses, communities and countries

    The realization of this outcome requires the strong commitment and involvement of political leadership in every country at all levels in the implementation and followup of this framework and in the creation of the necessary conducive and enabling environment.

II. Hasil yang diharapkan dan Tujuan

16. Sementara beberapa kemajuan dalam membangun ketangguhan dan mengurangi kerugian dan kerusakan telah dicapai, besarnya penurunan risiko bencana memerlukan ketekunan dan keseriusan, dengan fokus yang lebih eksplisit pada manusia dan kesehatan dan penghidupan mereka, dan menindaklanjuti secara teratur. Pembangunan pada Kerangka Aksi Hyogo, kerangka kerja ini bertujuan untuk mencapai hasil selama 15 tahun kedepan sebagai berikut:

    Secara substansial menurunkan risiko bencana dan kerugian hidup, kehidupan dan kesehatan dalam hal ekonomi, fisik, sosial, budaya dan aset lingkungan individu, bisnis, komunitas dan negara.

    Realisasi dari hasil yang ingin dicapai ini membutuhkan komitmen yang kuat dan keterlibatan kepemimpinan politik di setiap negara di semua tingkatan dalam pelaksanaan dan menindak-lanjuti kerangka ini serta dalam menciptakan situasi kondusif dan lingkungan yang

17. To attain the expected outcome, the following goal must be pursued:

Prevent new and reduce existing disaster risk through the implementation of integrated and inclusive economic, structural, legal, social, health, cultural, educational, environmental, technological, political and institutional measures that prevent and reduce hazard exposure and vulnerability to disaster, increase preparedness for response and recovery, and thus strengthen resilience

The pursuance of this goal requires the enhancement of the implementation capacity and capability of developing countries, in particular the least developed countries, small island developing States, landlocked developing countries and African countries, as well as middle-income countries facing specific challenges, including the mobilization of support through international cooperation for the provision of means of implementation in accordance with their national priorities.

mendukung.

17. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu diupayakan tujuan sebagai berikut:

Mencegah kemunculan yang baru dan mengurangi risiko bencana yang ada saat ini melalui langkah-langkah terpadu dan inklusif dalam bidang ekonomi, struktural, hukum, sosial, kesehatan, budaya, pendidikan, lingkungan, tekhnologi, politik dan kelembagaan secara terukur yang mencegah dan mengurangi paparan hazard dan kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapsiagaan dalam respon dan pemulihan, serta menguatkan ketangguhan.

Untuk mengejar tujuan ini diperlukan peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan dan kemampuan negara-negara berkembang -- khususnya negara-negara yang telah berkembang, negara kepulauan kecil, negara berkembang yang berada di tengah benua dan negara-negara di Afrika, serta negara-negara berkembang dengan pendapatan menengah yang menghadapi tantangan tertentu, termasuk mobilisasi dukungan melalui kerjasama internasional untuk penyediaan sarana pelaksana sesuai dengan prioritas nasional.

18. To support the assessment of global progress in achieving the outcome and goal of this framework, seven global targets have been agreed. These targets will be measured at the global level and will be complemented by work to develop appropriate indicators.
National targets and indicators will contribute to the achievement of the outcome and goal of this framework.

The seven global targets are:

(a) Substantially reduce global disaster mortality by 2030, aiming to lower average per 100,000 global mortality between 2020-2030 compared to 2005-2015.

(b) Substantially reduce the number of affected people globally by 2030, aiming to lower the average global figure per 100,000 between 2020-2030 compared to 2005-2015. [7]

(c) Reduce direct disaster economic loss in relation to global gross domestic product (GDP) by 2030.

18. Untuk mendukung penilaian kemajuan global dalam mencapai hasil yang diharapkan dan tujuan dari kerangka ini, tujuh target global telah disepakati. Target ini akan diukur di tingkat global dan akan dilengkapi melalui kerja untuk mengembangkan indikator yang tepat.
Target dan indikator nasional akan berkontribusi untuk mencapai hasil yang diharapkan dan tujuan dari kerangka kerja ini.

Ketujuh target global tersebut adalah:

a) Secara substansial mengurangi angka kematian bencana secara global pada tahun 2030, tujuannya adalah untuk menurunkan angka rata-rata per 100.000 angka kematian global antara periode 2020 - 2030 dibandingkan pada periode 2005 - 2015.

b) Secara substansial mengurangi jumlah orang yang terdampak secara global pada tahun 2030, tujuannya adalah untuk menurunkan rata-rata gambaran global per 100.000 antara periode 2020 - 2030 dibandingkan pada periode 2005 - 2015.[7]

c) Mengurangi kerugian ekonomi secara langsung akibat bencana dalam kaitannya

[7] Kategori orang yang terdampak akan dielaborasikan melalui proses pasca Sendai yang telah disepakari selama konferensi.
Categories of affected people will be elaborated in the process for post Sendai work decided by the Conference

(d) Substantially reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services, among them health and educational facilities, including through developing their resilience by 2030.

(e) Substantially increase the number of countries with national and local disaster risk reduction strategies by 2020.

(f) Substantially enhance international cooperation to developing countries through adequate and sustainable support to complement their national actions for implementation of this framework by 2030.

(g) Substantially increase the availability of and access to multi-hazard early warning systems and disaster risk information and assessments to the people by 2030.

dengan Produk Domestik Bruto secara global pada tahun 2030.

d) Secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada bangunan kritis dan gangguan terhadap layanan dasar, diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui pembangunan ketangguhan mereka pada tahun 2030.

e) Secara substansial meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana pada skala nasional dan lokal pada tahun 2020

f) Secara substansial meningkatkan kerjasama internasional untuk negara-negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk melengkapi aksi nasional mereka dalam melaksanakan kerangka kerja ini pada tahun 2030.

g) Secara substansial meningkatkan keberadaan dan akses terhadap sistem peringatan dini yang multi-hazard dan informasi risiko bencana serta penilaiannya kepada masyarakat pada tahun 2030.

III. Guiding principles

19. Drawing from the principles contained in the Yokohama Strategy for a Safer World:

III. Prinsip-prinsip Panduan

19. Gambaran dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Strategi Yokohama

Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation and its Plan of Action[8] and the Hyogo Framework for Action, the implementation of the present framework will be guided by the following principles, while taking into account national circumstances, and consistent with domestic laws as well as international obligations and commitments:

(a) Each State has the primary responsibility to prevent and reduce disaster risk, including through international, regional, subregional, transboundary and bilateral cooperation. The reduction of disaster risk is a common concern for all States and the extent to which developing countries are able to effectively enhance and implement national disaster risk reduction policies and measures in the context of their respective circumstances and capabilities can be further enhanced through the provision of sustainable international cooperation;

(b) Disaster risk reduction requires that responsibilities be shared by central Governments and relevant national authorities, sectors and stakeholders, as

untuk sebuah dunia yang lebih aman: Pedoman Pencegahan Bencana Alam, Kesiapsiagaan dan Mitigasi serta Rencana Aksinya[8] dan Kerangka Aksi Hyogo, pelaksanaan kerangka kerja ini akan dipandu oleh prinsip-prinsip berikut ini, dengan mempertimbangkan situasi nasional dan konsisten dengan hukum dalam negeri seperti halnya kewajiban dan komitmen internasional:

a) Setiap negara memeiliki tanggung jawab utama untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana, melalui kerja sama internasional, regional, sub-regional, lintas negara dan bilateral. Pengurangan risiko bencana merupakan masalah umum bagi semua negara dan sejauh mana negara-negara berkembang dapat secara efektif meningkatkan dan melaksanakan kebijakan pengurangan risiko bencana dan langkah-langkah terkait konteks dinegara masing-masing serta lebih dapat meningkatkan kemampuannya melalui kerjasama internasional yang berkelanjutan;

b) Pengurangan risiko bencana mensyaratkan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan otoritas nasional yang relevan,

[8] A/CONF.172/9, chap. I, resolution 1, annex I.

appropriate to their national circumstances and system of governance;

(c) Managing the risk of disasters is aimed at protecting persons and their property, health, livelihoods and productive assets, as well as cultural and environmental assets, while promoting and protecting all human rights, including the right to development;

(d) Disaster risk reduction requires an all-of-society engagement and partnership. It also requires empowerment and inclusive, accessible and non - discriminatory participation, paying special attention to people disproportionately affected by disasters, especially the poorest. A gender, age, disability and cultural perspective in all policies and practices; and the promotion of women and youth leadership; in this context, special attention should be paid to the improvement of organized voluntary work of citizens;

(e) Disaster risk reduction and management depends on coordination

sektor lainnya dan stakeholder yang sesuai dengan situasi nasionalnya dan sistem pemerintahannya;

c) Mengelola risiko bencana bertujuan untuk melindungi manusia dan harta benda mereka, kesehatan, penghidupan dan aset produksinya, serta aset budaya dan lingkungannya di samping mempromosikan dan melindungi seluruh hak asasi manusia, termasuk hak untuk membangun;

d) Pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat dan kemitraan. Hal ini juga membutuhkan pemberdayaan dan inklusif, dapat di akses dan partisipasi yang tidak diskriminatif, memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang terdampak oleh bencana secara tidak proporsional, terutama yang paling miskin. Perspektif gender, usia, cacat dan budaya dalam seluruh kebijakan dan praktik; dan mempromosikan kepemimpinan perempuan dan anak muda; dalam konteks ini, perhatian khusus harrus diberikan pada peningkatan kerja warga yang terorganisir secara sukarela;

e) Pengurangan dan manajemen risiko bencana tergantung pada mekanisme

mechanisms within and across sectors and with relevant stakeholders at all levels, and. it requires the full engagement of all State institutions of an executive and legislative nature at national and local levels and a clear articulation of responsibilities across public and private stakeholders, including business and academia, to ensure mutual outreach, partnership, complementarity in roles and accountability and follow-up;

(f) While the enabling, guiding and coordinating role of national and federal State Governments remain essential, it is necessary to empower local authorities and local communities to reduce disaster risk, including through resources, incentives and decision-making responsibilities, as appropriate;

(g) Disaster risk reduction requires a multi-hazard approach and inclusive risk-informed decision-making based on the open exchange and dissemination of disaggregated data, including by sex, age and disability, as well as on the easily accessible, up-to-date, comprehensible, science-based, non-sensitive risk information,

koordinasi di dalam dan lintas sektoral dan dengan stakeholder yang relevan di semua tingkatan, dan memerlukan keterlibatan penuh dari seluruh lembaga negara baik eksekutif dan legislatif di tingkat nasional dan lokal dan tanggung jawab yang jelas dipahami diantara stakeholder publik dan privat, termasuk bisnis dan akademisi, untuk memastikan capaian bersama, kemitraan, peran yang saling melengkapi serta akuntabilitas dan tindak lanjut;

f) Memungkinkannya, peran pemerintahan nasional dan federal dalam memandu dan mengkoordinasikan sangat penting, hal ini diperlukan untuk memperkuat otoritas lokal dan komunitas lokal untuk mengurangi risiko bencana, termasuk melalui sumber daya, insentif dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dengan selayaknya.

g) Pengurangan risiko bencana membutuhkan pendekatan multi-hazard dan inklusif risiko terinformasika pada pengambilan keputusan yang berdasarkan pada pertukaran secara terbuka dan penyebaran data yang terpilah, termasuk jenis kelamin, usia dan kecacatan, serta mudah diakses, kekinian, dipahami, berbasis ilmu,

complemented by traditional knowledge;

(h) The development, strengthening and implementation of relevant policies, plans, practices and mechanisms need to aim at coherence, as appropriate, across sustainable development and growth, food security, health and safety, climate change and variability, environmental management and disaster risk reduction agendas. Disaster risk reduction is essential to achieve sustainable development;

(i) While the drivers of disaster risk may be local, national, regional or global in scope, disaster risks have local and specific characteristics that must be understood for the determination of measures to reduce disaster risk;

(j) Addressing underlying disaster risk factors through disaster riskinformed public and private investments are more cost-effective than primary reliance on post-disaster response and recovery, and contribute to sustainable

informasi risiko yang tidak sensitif dan dilengkapi dengan pengetahuan tradisional;

h) Pengembangan, penguatan dan penerapan kebijakan yang relevan, perencanaan, praktik dan mekanisme perlu ditujukan secara koheren, semestinya mencakup pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan, ketahanan pangan, kesehatan dan keamanan, perubahan iklim dan variannya, agenda pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan;

i) Sementara pendorong risiko bencana bisa saja mencakup lokal, nasional, regional atau global, risiko bencana bersifat lokal dan memiliki karakteristik tertentu yang harus dipahami untuk menentukan langkah-langkah dalam mengurangi risiko bencana;

j) Mengatasi faktor mendasar risiko bencana dengan cara menginformasikan kepada publik dan swasta tentang risiko bencana merupakan investasi yang secara pembiayaan cukup efektif dibandingkan jika mengandalkan respon pasca bencana dan pemulihan, serta

development;

(k) In the post-disaster recovery, rehabilitation and reconstruction phase it is critical to prevent the creation of and to reduce disaster risk by "Building Back Better" and increasing public education and awareness of disaster risk;

(l) An effective and meaningful global partnership and the further strengthening of international cooperation, including the fulfilment of respective commitments of official development assistance by developed countries, are essential for effective disaster risk management;

(m) Developing countries, in particular the least developed countries, small island developing States, landlocked developing countries and African countries, as well as middle-income and other countries facing specific disaster risk challenges need adequate, sustainable and timely provision of support, including through finance, technology transfer and capacity-building from developed countries and partners tailored to their needs and

berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan;

k) Dalam tahap pemulihan pasca bencana, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan cukup kritis dalam mencegah bentuk baru dan untuk mengurangi risiko bencana melalui "membangun kembali dengan lebih baik" dan meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik terkait risiko bencana;

l) Sebuah kemitraan global yang efektif dan bermakna serta penguatan lebih lanjut dari kerjadama internasinal, termasuk pemenuhan komitmen masing-masing terkait bantuan pembangunan yang resmi oleh negara yang telah berkembang, sangat penting bagi manajemen risiko bencana yang efektif;

m) Negara-negara berkembang, khususnya negara yang telah berkembang, negara dengan pulau-pulau kecil, negara berkembang yang berada di benua dan negara-negara di Afrika, negara dengan pendapatan menengah dan negara-negara yang memiliki tantangan risiko bencana tertentu membutuhkan keberlanjutan dan dukungan yang tepat secara memadai, termasuk melalui finansial, transfer tekhnologi dan membangun kapasitas dai negaraa yang

priorities, as identified by them.

lebih maju dan mitra yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka, seperti yang telah mereka identifikasi.

IV. Priorities for action

20. Taking into account the experience gained through the implementation of the Hyogo Framework for Action, and in pursuance of the expected outcome and goal, there is a need for focused action within and across sectors by States at local, national, regional and global levels in the following four priority areas:
    1. Understanding disaster risk;
    2. Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk;
    3. Investing in disaster risk reduction for resilience;
    4. Enhancing disaster preparedness for effective response, and to "Build Back Better" in recovery, rehabilitation and reconstruction.

21. In their approach to disaster risk reduction, States, regional and international organizations and other relevant stakeholders should take into considerat ion the key activities listed under each of these

IV. Prioritas Aksi

20. Dengan mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh melalui penerapan Kerangka Aksi Hyogo, dan dalam upaya mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan, ada kebutuhan untuk difokuskan aksi lintas sektor oleh negara pada tingkatan lokal, nasional, regional dan global dalam empat area prioritas berikut ini:
    1. Memahami risiko bencana;
    2. Memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana;
    3. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
    4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk "membangun kembali dengan lebih baik" dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

21. Dalam pendekatannya untuk pengurangan risiko bencana, negara, organisasi regional dan internasional dan stakeholder yang relevan lainnya harus mempertimbangkan aktivitas kunci tang terdaftar dalam empat

four priorities and should implement them, as appropriate, taking into consideration respective capacities and capabilities, in line with national laws and regulations.

22. In the context of increasing global interdependence, concerted international cooperation, an enabling international environment and means of implementation are needed to stimulate and contribute to developing the knowledge, capacities and motivation for disaster risk reduction at all levels, in particular for developing countries.

prioritas ini dan harus mengimplementasikannya secara memadai, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas masing-masing, sejalan dengan hukum dan peraturan nasional.

22. Dalam konteks meningkatkan saling ketergantungan secara global, kerjasama internasional yang saling terpadu, lingkungan internasional yang memungkinkan dan sarana implementasi yang dibutuhkan untuk menstimulasi dan berkontribusi untuk pengembangan pengetahuan, kapasitas dan motivasi untuk pengurangan risiko bencana di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang.

Priority 1. Understanding disaster risk

23. Policies and practices for disaster risk management should be based on an understanding of disaster risk in all its dimensions of vulnerability, capacity, exposure of persons and assets, hazard characteristics and the environment. Such knowledge can be leveraged for the purpose of pre -disaster risk assessment, for prevention and mitigation and for the development and implementation of appropriate preparedness and effective response to disasters.

Prioritas 1. Memahami Risiko Bencana

23. Kebijakan dan praktik manajemen risiko bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana pada semua dimensi kerentanan, kapasitas, orang dan aset yang terpapar, karakteristik bahaya dan lingkungan. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko sebelum bencana, untuk pencegahan dan mitigasi serta untuk pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang memadai dan respon yang efektif terhadap bencana.

National and local levels

24. To achieve this, it is important to:

(a) Promote the collection, analysis, management and use of relevant data and practical information. Ensure its dissemination, taking into account t he needs of different categories of users, as appropriate;

(b) Encourage the use of and strengthening of baseline and periodically assess disaster risks, vulnerability, capacity, exposure, hazard characteristics and their possible sequential effects at the relevant social and spatial scale on ecosystems in line with national circumstances;

(c) Develop, update periodically and disseminate, as appropriate, location - based disaster risk information, including risk maps, to decision makers, the general public and communities at risk to disaster in an appropriate format by using, as applicable, geospatial information technology;

Tingkat nasional dan lokal

24. Untuk mencapai hal tersebut, penting untuk:

a) Mempromosikan kumpulan analisis, manajemen dan penggunaan data yang relevan dan informasi praktis. Memastikan penyebarannya, dengan memeprhatikan kebutuhan bagi pengguna dengan kategori yang berbeda secara memadai;

b) Mendorong penggunaan dan penguatan baseline dan penilaian risiko bencana secara periodik, kerentanan, kapasitas, keterpaparan, karakteristik hazard dan kemungkinan dampak lanjutan pada skala sosial dan spasial yang relevan pada ekosisten sesuai dengan situasi nasional;

c) Mengembangkan, memperbaharui dan menyebarluaskan secara berkala, informasi risiko bencana berdasarkan lokasi, termasuk peta risiko kepada pembuat kebijakan, masyarakat umum dan komunitas terkait risiko bencana dalam format yang memadai dengan menggunakan tekhnologi informasi geospasial;

(d) Systematically evaluate, record, share and publicly account for disaster losses and understand the economic, social, health, education, environmental and cultural heritage impacts, as appropriate, in the context of event -specific hazard-exposure and vulnerability information;

(e) Make non-sensitive hazard exposure, vulnerability, risk, disasters and loss disaggregated information freely available and accessible, as appropriate;

(f) Promote real-time access to reliable data, make use of space and in situ information, including geographic information systems (GIS), and use information and communications technology innovations to enhance measurement tools and the collection, analysis and dissemination of data;

(g) Build the knowledge of government officials at all levels, civil society, communities and volunteers, as well as the private sector, through sharing experiences, lessons learned, good practices and training and education on disaster risk reduction, including the use of existing training and education mechanisms and peer learning;

d) Secara sistematis mengevaluasi, mencatat, membagihan dan mempublikasikan perhitungan kerugian akibat bencana dan memahami aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dampak terhadap kelestarian lingkungan dan budaya, dalam konteks peristiwa keterpaparan hazard yang spesifik dan kerentanan informasi;

e) Membuat keterpaparan hazard yang tidak sensitif, kerentanan, risiko, bencana dan informasi terpilah terkait kerugian secara bebas tersedia dan bisa diakses secara memadai;

f) Mempromosikan akses ke data yang dapat di percaya dan tepat waktu, memanfaatkan ruang dan informasi dari tempat asalnya, termasuk sistem informasi geografis (GIS), dan menggunakan informasi dan inovasi tekhnologi komunikasi untuk meningkatkan perangkat pengukuran dan mengumpulkan, menganalisis dan menyebarluaskan data;

g) Membangun pengetahuan bagi pejabat pemerintah di semua tingktan, masyarakat sipil, komunitas dan relawan, serta lembaga usaha melalui berbagi pengalaman, pembelajaran,

(h) Promote and improve dialogue and cooperation among scientific and technological communities, other relevant stakeholders and policymakers in order to facilitate a science-policy interface for effective decision -making in disaster risk management;

(i) Ensure the use of traditional, indigenous and local knowledge and practices, as appropriate, to complement scientific knowledge in disaster risk assessment and the development and implementation of policies, strategies, plans and programmes of specific sectors, with a cross-sectoral approach, which should be tailored to localities and to the context;

(j) Strengthen technical and scientific capacity to capitalize on and consolidate existing knowledge, and to develop and apply methodologies and models to assess disaster risks, vulnerabilities and exposure to all hazards;

praktik baik dan pelatihan serta pendidikan dalam pengurangan risiko bencana, termasuk memanfaatkan pelaitahan yang ada dan mekanisme pendidikan dan pembelajaraan rekan sebaya;

h) Mempromosikan dan meningkatkan dialog dan kerjasama natar komunitas ilmiah dan tekhnologi, stakeholder lainnya yang relevan dan pembuat kebijakan untuk memfalititasi pertemuan tatap muka anara ilmu dan kebijakan untuk pengambilan keputusan yang baik dalam manajemen risiko bencana;

i) Memastikan penggunaan pengetahuan dan praktek-praktek tradisional, adat dan lokal yang sesuai, untuk melengkapi pengetahuan ilmiah dalam penilaian risiko bencana dan pengembangan serta implementasi kebijakan, strategi, perencanaan dan program sektor-sektor tertentu dengan pendekatan lintas sektoral, yang harus disesuaikan dengan konteks lokal;

j) Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk memanfaatkan dan mengkonsolidasikan pengetahuan yang ada, dan untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi dan model

(k) Promote investments in innovation and technology development in long - term, multi-hazard and solution-driven research in disaster risk management to address gaps, obstacles, interdependencies and social, economic, educational and environmental challenges and disaster risks;

(l) Promote the incorporation of disaster risk knowledge, including disaster prevention, mitigation, preparedness, response, recovery and rehabili tation, in formal and non-formal education, as well as in civic education at all levels, as well as in professional education and training;

(m) Promote national strategies to strengthen public education and awareness in disaster risk reduction, including disaster risk information and knowledge, through campaigns, social media and community mobilization, taking into account specific audiences and their needs;

(n) Apply risk information in all its dimensions

untuk menilai risiko bencana, kerentanan dan keterpaparan semua hazard;

k) Mempromosikan imvestasi dalam inovasi dan pengembangan tekhnologi dalam jangka panjang, penelitian yang multi-hazard dan memberikan solusi dalam manajemen risiko bencana untuk mengatasi kesenjangan, hambatan, saling ketergantungan, dan tantangan serta risiko bencana sosial, ekonomi, pendidikan dan lingkungan;

l) Mempromosikan penggabungan pengetahuan risiko bencana, termasuk pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan rehabilitasi, pendidikan formal dan non-formal, serta pendidikan publik di semua tingkatan, seperti halnya dalam pendidikan profesional dan pelatihan;

m) Mempromosikan strategi nasional untuk memperkuat pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, termasuk informasi risiko bencana dan pengetahuan, melalui kampanye, media sosial, mobilisasi masyarakat, dengan memperhatikan khalayak tertentu dan kebutuhan mereka;

n) Menerapkan informasi risiko dan

of vulnerability, capacity and exposure of persons, communities, countries and assets, as well as hazard characteristics, to develop and implement disaster risk reduction policies;

(o) Enhance collaboration among people at the local level to disseminate disaster risk information through the involvement of community-based organizations and non-governmental organizations.

semua dimensi kerentanan, kapasitas dan keterpaparan orang, komunitas, negara dan aset-asetnya, seperti halnya karakteristik hazard, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pengurangan risiko bencana;

o) Meningkatkan kolaborasi diantara masyarakat di tingkat lokal untuk menyebarluaskan informasi risiko bencana melalui keterlibatan organisasi berbasis komunitas dan organisasi non-pemerintah.

Global and regional levels

25. To achieve this, it is important to:

(a) Enhance the development and dissemination of science -based methodologies and tools to record and share disaster losses and relevant disaggregated data and statistics, as well as to strengthen disaster risk modelling, assessment, mapping, monitoring and multi -hazard early warning systems;

(b) Promote the conduct of comprehensive surveys on multi -hazard disaster risks

Tingkat global dan regional

25. Untuk mencapai hal ini, penting untuk:

a) Meningkatkan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan berdasarkan metodologi dan alat perekam serta berbagi kerugian akibat bencana, dan data terpilah dan statistik yang relevan, serta untuk memperkuat model risiko bencana, penilaian, pemetaan, monitoring dan sistem peringatan dini yang multi-hazard;

b) Mempromosikan pelaksanaan survei

and the development of regional disaster risk assessments and maps, including climate change scenarios;

(c) Promote and enhance, through international cooperation, including technology transfer, access to and the sharing and use of non -sensitive data, information, as appropriate, communications and geospatial and space -based technologies and related services. Maintain and strengthen in situ and remotely - sensed earth and climate observations. Strengthen the utilization of media, including social media, traditional media, big data and mobile phone networks to support national measures for successful disaster risk communication, as appropriate and in accordance with national laws;

(d) Promote common efforts in partnership with the scientific and technological community, academia and the private sector to establish, disseminate and share good practices internationally;

(e) Support the development of local, national, regional and global user -

yang komprehensif tentang risiko bencana yang multi-hazard dan pengembangan kajian penilaian risiko bencana dan pemetaan, termasuk skenario perubahan iklim;

c) Mempromosikan dan meningkatkan, melalui kerjasama internasional, termasuk transfer tekhnologi, akses, berbagi dan penggunaan data yang tidak sensitif, informasi, selayaknya komunikasi dan geospasial serta terkhnologi ruang angkasa dan layanan terkait. Mengelola dan memperkuat pada posisi aslinya dan di kendalikan dari bumi serta pengamatan iklim. Memperkuat pemanfaatan media, termasuk media sosial, media tradisional, jaringan data yang besar dan telpon seluler untuk mendukung langkah-langkah nasional bagi keberhasilan komunikasi risiko bencana, sebagaimana layaknya dan sesuai dengan hukum nasional;

d) Mempromosikan usaha bersama dalam kemitraan dengan komunitas ilmiah dan tekhnologi, akademisi dan lembaga usaha untuk membangun, menyebarkan dan berbagi praktik baik secara internasional;

e) Mendukung pengembangan sistem

friendly systems and services for the exchange of information on good practices, cost-effective and easy-to-use disaster risk reduction technologies and lessons learned on policies, plans and measures for disaster risk reduction;

(f) Develop effective global and regional campaigns as instruments for public awareness and education, building on the existing ones (for example, the "One Million Safe Schools and Hospitals" initiative, the "Making Cities Resilient: my city is getting ready!" campaign, the United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction and the annual United Nations International Day for Disaster Reduction), to promote a culture of disaster prevention, resilience and responsible citizenship, generate understanding of disaster risk, support mutual learning, share experiences. Encourage public and private stakeholders to actively engage in such initiatives, and develop new ones at local, national, regional and global levels;

yang ramah di tingkat lokal, nasional, regional dan global serta melayani pertukaran informasi terkait praktik baik, pembiayaan yang efektif dan tekhnologi pengurangan risiko bencana yang mudah digunakan serta pembelajaran terkait kebijakan, perencanaan dan langkah-langkah pengurangan risiko bencana;

f) Mengembangkan kampanye global dan regional yang efektif sebagai instrumen untuk kesadaran dan pendidikan masyarakat, membangun yang sudah ada (misalnya, inisiatif "satu juta sekolah dan rumah sakit aman", kampanye "Making Cities Resillient: my city is getting ready!", UN - Sasakawa Award untuk pengurangan risiko bencana dan agenda tahunan UN - International Day for Disaster Reduction), untuk mempromosikan budaya mencegah bahaya, ketangguhan dan warga negara yang bertanggungjawab, pemahaman yang sama terkait risiko bencana, mendukung untuk saling belajar, berbagi pengalaman. Mendorong stakeholder umum dan swasta untuk secara aktif terlibat dalam inisiatif serupa, dan

(g) Enhance the scientific and technical work on disaster risk reduction and its mobilization through the coordination of existing networks and scientific research institutions at all levels and all regions with the support of the UNISDR Scientific and Technical Advisory Group in order to: strengthen the evidence-base in support of the implementation of this framework; promote scientific research of disaster risk patterns, causes and effects; disseminate risk information with the best use of geospatial information technology; provide guidance on methodologies and standards for risk assessments, disaster risk modelling and the use of data; identify research and technology gaps and set recommendations for research priority areas in disaster risk reduction; promote and support the availability and application of science and technology to decision-making; contribute to the update of the 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction; use post-disaster reviews as opportunities to enhance learning and public policy; and disseminate studies;

mengembangkan sesuatu yang baru di tingkat lokal, nasional, regional dan global;

g) Meningkatkan kerja ilmiah dan teknis terkait pengurangan risiko bencana dan mobilisasi melalui koordinasi jaringan yang ada dan lembaga penelitian ilmiah di semua tingkatan dan seluruh wilayah dengan dukungan dari kelompok advisor ilmiah dan teknis UNISDR untuk: memperkuat bukti mendasar dalam mendukung implementasi kerangka ini; mempromosikan penelitian ilmiah pola risiko bencana, penyebab dan efeknya; menyebarluaskan informasi risiko dengan penggunaan teknologi informasi geospasial; memberikan panduan tentang metodologi dan standar untuk penilaian risiko, pemodelan risiko bencana dan penggunaan data; mengidentifikasi penelitian dan kesenjangan teknologi serta memberikan rekomendasi untuk daerah prioritas penelitian dalam pengurangan risiko bencana; mempromosikan dan mendukung ketersediaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat keputusan; berkontribusi

(h) Encourage the availability of copyrighted and patented materials including through negotiated concessions as appropriate.

(i) Enhance access to and support for innovation and technology as well as in long-term, multi-hazard and solution-driven research and development in disaster risk management.

pada pemutakhiran terminologi UNISDR tahun 2009 tentang pengurangan risiko bencana; menggunakan ulasan pasca bencana sebagai peluang untuk meningkatkan pembelajaran dan kebijakan publik; serta menyebarluaskan hasil kajian;

h) Mendorong ketersediaan hak cipta dan paten materi-materi termasuk melalui konsesi negosiasi yang sesuai.

i) Meningkatkan akses dan dukungan untuk inovasi dan teknologi jangka panjang, penelitian yang multi-hazard dan memberikan solusi serta pengembangan manajemen risiko bencana.

Priority 2. Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk

26. Disaster risk governance at the national, regional and global levels is of great importance for an effective and efficient management of disaster risk. Clear vision, plans, competence, guidance and coordination within and across sectors as well as participation of relevant stakeholders are needed. Strengthening disaster risk governance for prevention,

Prioritas 2: Penguatan Tata Kelola Risiko Bencana untuk Mengelola Risiko Bencana

26. Tata kelola risiko bencana di tingkat nasional, regional dan global sangat penting untuk manajemen yang efektif dan efisien terkait risiko bencana. Visi yang jelas, rencana, kompetensi, panduan dan koordinasi yang lintas sektoral serta partisipasi dari stakeholder terkait diperlukan. Penguatan tata kelola risiko bencana untuk pencegahan, mitigasi,

mitigation, preparedness, response, recovery, and rehabilitation is therefore necessary and fosters collaboration and partnership across mechanisms and institutions for the implementation of instruments relevant to disaster risk reduction and sustainable development.

National and local levels

27. To achieve this, it is important to:
    (a) Mainstream and integrate disaster risk reduction within and across all sectors. Review and promote the coherence and further development , as appropriate, of national and local frameworks of laws, regulations and public policies, which, by
    Defining roles and responsibilities, guide the public and private sectores to:infrastructures; (ii) promote and provide incentives, as relevant, for actions by persons, households, communities and businesses; (iii) enhance relevant mechanisms and initiatives for disaster risk transparency, which may include financial incentives, public awareness-raising and training initiatives, reporting requirements and legal and administrative measures; and

kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan rehabilitasi perlu untuk mendorong mekanisme kolaborasi dan kemitraan di seluruh lembaga dan untuk penggunaan instrumen yang relevan dengan pengurangan risiko bencana dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tingkat nasional dan lokal

27. Untuk mencapai ini, penting untuk:
    a) Mengarusutamakan dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana di semua sektor. Mereview dan mempromosikan secara koheren serta pengembangan lebih lanjut kerangka kerja nasional dan lokal terkait hukum, peraturan dan kebijakan publik dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawab, memandu sektor publik dan swasta untuk: (i) mengatasi risiko bencana terkait kepemilikan publik, mengelola atau mengatur layanan dan infrastruktur; (ii) mempromosikan dan memberikan insentif yang memadai untuk aksi-aksi individu, rumah tangga, komunitas dan kalangan bisnis; (iii) meningkatkan mekanisme yang relevan dan inisiatif bagi transparansi risiko bencana, yang mungkin meliputi

(iv) put in place coordination and organizational structures;

(b) Adopt and implement national and local disaster risk reduction stra tegies and plans, across different timescales with targets, indicators and time frames, aimed at preventing the creation of risk, the reduction of existing risk and the strengthening of economic, social, health and environmental resilience;

(c) Carry out an assessment of the technical, financial and administrative disaster risk management capacity to deal with the identified risks at local and national level;

(d) Encourage the establishment of necessary mechanisms and incentives to ensure high levels of compliance with existing safety-enhancing provisions of sectoral laws and regulations, including those addressing land use and urban planning, building codes, environmental and resource management and health and safety

insentif finansial, meningkatnya kesadaran publik dan inisiatif pelatihan, permintaan pelaporan serta langkah-langkah hukum dan adminstratif; dan (iv) meletakkan koordinasi pada tempatnya dan struktur organisasi;

b) Mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana dan perencanaan di tingkat nasional dan lokal, dalam rentang waktu berbeda sesuai target, indikator, dan jangka waktu, dengan tujuan untuk mencegah pembentukan risiko, pengurangan risiko yang ada dan penguatan ketangguhan ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan;

c) Melaksanakan penilaian terhadap kapasitas manajemen risiko bencana secara teknis, finansial dan administratif untuk menangani risiko yang teridentifikasi di tingkat lokal dan nasional;

d) Mendorong pembentukan mekanisme yang diperlukan dan insentif uantuk memastikan tingkatan sesuai dengan ketentuan keselamatan yang ada -- meningkatkan pengawasan sektor hukum dan regulasi, termasuk penanganan penggunaan lahan dan perencanaan kawasan urban, kode

standards, and update them, where needed, to ensure an adequate focus on disaster risk management;

(e) Develop and strengthen, as appropriate, mechanisms to follow -up, periodically assess and publicly report on progress on national and local plans. Promote public scrutiny and encourage institutional debates, including by parliamentarians and other relevant officials, on progress reports of local and national plans for disaster risk reduction;

(f) Assign, as appropriate, clear roles and tasks to community representatives within disaster risk management institutions and processes and decision-making through relevant legal frameworks. Undertake comprehensive public and community consultations during the development of such laws and regulations to support their implementation;

(g) Establish and strengthen government coordination forums composed of

bangunan, manajemen lingkungan dan sumber daya serta standar kesehatan dan keamanan, dan memutakhirkan, ketika dibutuhkan, untuk meningkatkan fokus yang semestinga terkait manajemen risiko bencana;

e) Mengembangkan dan memperkuat mekanisme untuk menindak lanjuti, secara berkala melakukan penilaian dan melaporkan kepada publik progres perencanaan nasional dan lokal. Mempromikan pengawasan publik dan mendorong perdebatan kelembagaan, termasuk dengan anggota parlemen dan pejabat terkait lainnya terkait laporan kemajuan rencana lokal dan nasional untuk pengurangan risiko bencana;

f) Menetapkan peran yang jelas sesuai dengan tugas bagi yang mewakili masyarakat dalam lembaga manajemen risiko bencana serta proses pengambilan keputusan melalui kerangka hukum yang relevan. Secara comprehensif melakukan konsultasi publik dan komunitas selama pengembangan hukum dan regulasi untuk mendukung implementasinya;

g) Membangun dan memperkuat forum koordinasi pemerintah yang teridiri

relevant stakeholders at national and local levels, such as national and local platforms for disaster risk reduction, and a designated national focal point for implementing the post-2015 framework. It is necessary for such mechanisms to have a strong foundation in national institutional frameworks with clearly assigned responsibilities and authority to, inter alia, identify sectoral and multisectoral disaster risk, build awareness and knowledge of disaster risk through sharing and dissemination of non-sensitive disaster risk information and data, contribute to and coordinate reports on local and national disaster risk, coordinate public awareness campaigns on disaster risk, facilitate and support local multi-sectoral cooperation (e.g. among local governments), contribute to the determination of and reporting on national and local disaster risk management plans and all policies relevant for disaster risk management. These responsibilities should be established through laws, regulations, standards and procedures;

dari stakeholder yang relevan di tingkat nasional dan lokal untuk pengurangan risiko bencana, dan titik fokus nasional yang ditujukan untuk pelaksanaan kerangka pasca 2015. Hal ini diperlukan agar mekanisme tersebut memiliki dasar yang kuat dalam kerangka kelembagaan nasional dengan tanggung jawab yang jelas ditugaskan dan wewenang untuk, diantaranya, mengidentifikasi risiko bencana baik sektoral maupun multi sektoral, membangun kesadaran dan pengetahuan tentang risiko bencana dengan saling berbagi dan menyebarkan informasi dan data risiko bencana yang tidak sensitif, berkontribusi dan mengkoordinasikan laporan risiko bencana di tingkat lokal dan nasional, mengkoordinasikan kampanye untuk penyadaran masyarakat tentang risiko bencana, memfasilitasi dan mendukung kerjasama multi sektoral di tingkat lokal (misalnya antara pemerintah daerah), memberikan kontribusi untuk penentuan dan pelaporan nasional serta rencana pengelolaan risiko bencana di tingkat lokal dan seluruh kebijakan yang relevan untuk

(h) Empower local authorities, as appropriate, through regulatory and financial means to work and coordinate with civil society, communities and indigenous peoples and migrants in disaster risk management at the local level;

(i) Encourage parliamentarians to support the implementation of disaster risk reduction through developing new or amending relevant legislation and setting budget allocations;

(j) Promote the development of quality standards, such as certifications and awards for disaster risk management, with the participation of the private sector, civil society, professional associations, scientific organizations and the United Nations;

(k) Formulate public policies, where applicable, aimed at addressing the issues of prevention or relocation, where possible, of human settlements in disaster risk zones, subject to national law and legal systems.

manajemen risiko bencana. Tanggungjawab ini harus ditetapkan melalui undang-undang, peraturan, standar dan prosedur;

h) Memberdayakan pemerintah daerah dengan selayaknya melalui peraturan dan finansial untuk bekerja dan berkoordinasi dengan masyarakat sipil, komunitas serta penduduk asli dan pendatang untuk mengelola risiko di tingkat lokal;

i) Mendorong anggota parlemen untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana melalui pengembangan peraturan baru atau amandemen peraturan yang relevan dan pengalokasian anggaran;

j) Mempromosikan pengembangan standar kualitas, seperti sertifikasi dan penghargaan untuk manajemen risiko bencana dengan partisipasi dari lembaga usaha, masyarakat sipil, perkumpulan profesional, organisasi ilmiah dan Lembaga PBB;

k) Merumuskan kebijakan publik yang dapat diaplikasikan, yang bertujuan untuk mengatasi isu-isu pencegahan atau relokasi pemukiman warga di daerah yang memiliki risiko bencana (jika memungkinkan) sesuai dengan

Global and regional levels

28. To achieve this, it is important to:

(a) Guide action at the regional level through agreed regional and subregional strategies and mechanisms for cooperation for disaster risk reduction, as appropriate in the light of this framework, in order to foster more efficient planning, create common information systems and exchange good practices and programmes for cooperation and capacity development, in particular to address common and transboundary disaster risks;

(b) Foster collaboration across global and regional mechanisms and institutions for the implementation and coherence of instruments and tools relevant to disaster risk reduction, such as for climate change, biodiversity, sustainable development, poverty eradication, environment, agriculture, health, food and nutrition and others, as appropriate;

hukum nasional dan sistem yang berlaku.

Tingkat global dan regional

28. Untuk mencapai hal ini, penting untuk:

a) Memberikan panduan aksi ditingkat regional melalui strategi dan mekanisme kerjasama yang disepakati di tingkat regional dan sub-regional untuk pengurangan risiko bencana, seperti yang diharapkan dalam kerangka kerja ini, dalam rangka untuk mendorong perencanaan yang lebih efisien, menciptakan sistem informasi umum dan praktik pertukan yang baik serta program untuk kerjasama dan pengembangan kapasitas, khususnya untuk mengatasi risiko bencana yang umum dan melintasi batas negara;
b) Menjaga mekanisme kolaborasi global dan regional serta kelembagaan untuk mengimplementasikan dan penggunaan instrumen dan perangkat yang relevan untuk pengurangan risiko bencana, seperti untuk perubahan iklim, keragaman hayati, pembangunan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, lingkungan,

(c) Actively engage in the Global Platform for Disaster Risk Reduction, the regional and subregional platforms for disaster risk reduction and the thematic platforms in order to forge partnerships, periodically assess progress on implementation and share practice and knowledge on disaster risk-informed policies, programmes and investments, including on development and climate issues, as appropriate, as well as promote the integration of disaster risk management in other relevant sectors. Regional intergovernmental organizations should play an important role in the regional platforms for disaster risk reduction;

(d) Promote transboundary cooperation to enable policy and planning for the implementation of ecosystem-based approaches with regard to shared resources, such as within river basins and along coastlines, to build resilience and reduce disaster risk, including epidemic and displacement risk;

pertanian, kesehatan, pangan dan nutrisi serta lainnya.

c) Secara aktif terlibat dalam platform global untuk pengurangan risiko bencana, platform regional dan sub-regional untuk pengurangan risiko bencana serta platform tematik untuk menjamin kemitraan, yang secara berkala melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan dan berbagi praktik serta pengetahuan tentang kebijakan yang terinformasikan risiko bencana, program dan investasi, termasuk pada isu pembangunan dan iklim, serta mempromosikan integrasi manajemen risiko bencana di sektor-sektor lain yang relevan. Organisasi lintas pemerintahan di tingkat regional harus memainkan peran penting dalam platform regional untuk pengurangan risiko bencana;

d) Mempromosikan kerja sama lintas negara untuk mengaktifkan kebijakan dan perencanaan untuk implementasi dengan pendekatan yang berbasis ekosistem dalam berbagi sumber daya, sepertih di daerah aliran sungai dan di sepanjang pantai, untuk membangun ketangguhan dan mengurangi risiko bencana, termasuk risiko epidemi dan

(e) Promote mutual learning and exchange of good practices and information through, inter-alia, voluntary and self-initiated peer reviews among interested states;

(f) Promote the strengthening of, as appropriate, international voluntary mechanisms for monitoring and assessment of disaster risks, including relevant data and information, benefiting from the experience of the Hyogo Framework for Action Monitor. Said mechanisms may promote the exchange of non -sensitive information on disaster risks to the relevant national Government bodies and stakeholders in the interest of sustainable social and economic development;

pengungsian;

e) Mempromosikan untuk saling belajar dan pertukaran praktik baik serta informasi melalui, diantaranya, melakukan review setara secara sukarela dan mandiri diantara negara-negara;

f) Mempromosikan penguatan mekanisme internasional secara sukarela yang sesuai untuk pemantauan dan penilaian risiko bencana, termasuk data dan informasi yang relevan, memanfaatkan pengalaman dalam memonitor Kerangka Aksi Hyogo. Menyatakan mekanisme yang mungkin bisa mempromosikan pertukaran informasi yang tidak sensitif tentang risiko bencana ke badan pemerintahan nasional dan stakeholder yang relevan untuk kepentingan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan;

Priority 3. Investing in disaster risk reduction for resilience

29. Public and private investment in disaster risk prevention and

Prioritas 3: Investasi dalam Pengurangan Risiko Bencana untuk Ketangguhan

29. Investasi publik dan swasta dalam pencegahan dan pengurangan risiko

reduction through structural and non-structural measures are essential to enhance the economic, soci al, health and cultural resilience of persons, communities, countries and their assets, as well as the environment. These can be drivers of innovation, growth and job creation. Such measures are cost-effective and instrumental to save lives, prevent and reduce losses and ensure effective recovery and rehabilitation.

bencana melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural yang penting untuk meningkatkan ketangguhan perekonomian, sosial, kesehatan dan budaya dari individu, komunitas, negara dan aset-aset mereka, seperti halnya juga lingkungan. Hal ini untuk mendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Langkah-langkah tersebut melaui pembiayaan yang efektif dan berperan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah dan mengurangi kerugian serta memastikan pemulihan dan rehabilitasi yang efektif.

National and local levels

30. To achieve this, it is important to:

(a) Allocate the necessary resources, including finance and logistics, as appropriate, at all levels of administration for the development and the implementation of disaster risk reduction strategies policies, plans, laws and regulations in all relevant sectors;
(b) Promote mechanisms for disaster risk transfer and insurance, risk sharing and retention and financial protection, as appropriate, for both public and

Tingkat nasional dan lokal

30. Untuk mencapai ini, penting untuk:

a) Mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, termasuk finansial dan logistik disemua tingkat pemerintahan untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan strategis pengurangan risiko bencana, perencanaan dan peraturan di semua sektor yang relevan;
b) Mempromosikan mekanisme tranfer risiko bencanan dan asuransi, berbabgi risiko dan retensi serta perlindungan finansial, bagi investasi publik dan swasta dalam rangka mengurangi

private investment in order to reduce the financial impact of disasters on governments and societies, in urban and rural areas;

(c) Strengthen, as appropriate, disaster resilient public and private investments, particularly through: structural, non-structural and functional disaster risk prevention and reduction measures in critical facilities, in particular schools and hospitals and physical infrastructures; building better from the start to withstand hazards through proper design and construction, including the use of the principles of universal design and the standardization of building materials; retrofitting and rebuilding; nurturing a culture of maintenance; and taking into account economic, social, structural, technological and environmental impact assessments;

(d) Protect or support the protection of cultural and collecting institutions and other sites of historical, cultural heritage and religious interest;

(e) Promote the disaster risk resilience of work places through structural and non-structural measures;

dampak finansial akibat bencana pada pemerintah dan masyarakat, di daerah urban dan rural;

c) Memperkuat masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan investasi swasta, khususnya secara: struktural, pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui tindakan struktural dan fungsional untuk fasilitas penting, khususnya sekolah dan rumah sakit serta prasarana fisik lainnya; membangun lebih baik dari awal untuk menahan bahaya melalui desain dan konstruksi yang tepat, termasuk penggunaan prinsip-prinsip desain yang universal dan bahan bangun yang terstandarisasi; retrofitting dan pembangunan kembali; membiasakan budaya pemeliharaan; dan mempertimbangkan penilaian dampaka ekonomi, sosial, struktural, teknologi dan lingkungan;

d) Melindungi dan mendukung pelestarian lembaga budaya dan benda-benda yang dikumpulkan serta situs bersejarah lainnya, warisan budaya dan terkait keagamaan;

e) Mempromosikan ketangguhan risiko bencana di tempat kerja melalui langkah-langkah struktural dan non-

(f) Promote the mainstreaming of disaster risk assessments into land -use policy development and implementation, including urban planning, land degradation assessments and informal and non-permanent housing, and the use of guidelines and follow-up tools informed by anticipated demographic and environmental changes;

(g) Promote the mainstreaming of disaster risk assessment, mapping and management into rural development planning and manageme nt of, inter alia, mountains, rivers, coastal flood plain areas, drylands, wetlands and all other areas prone to droughts and flooding, including through the identification of areas that are safe for human settlement and at the same time preserving ecosystem functions that help reduce risks;

(h) Encourage the revision of existing or the development of new building codes, standards, rehabilitation and reconstruction practices at the national or local levels, as appropriate, with the aim of making them mor e applicable

struktural;

f) Mempromosikan pengarusutamaan penilaian risiko bencana ke dalam pembangunan kebijakan penggunaan lahan dan pelaksanaannya, termasuk perencanaan kawasan urban, penilaian degradasi lahan dan perumahan informal dan non-permanen, dan penggunaan panduan dan alat yang menginformasikan tindak lanjut dengan mengantisipasi perubahan demografis dan lingkungan;

g) Mempromosikam pengarusutamaan penilaian risiko bencana, pemetaan dan manajemen dalam perencanaan pembangunan rural dan manajemen pegunungan, sungai, daerah pinggir pantai yang rawan banjir, lahan kering, lahan basah dan daerah lain yang rawan kekeringan dan banjir, termasuk mengidentifikasi daerah yang man bagi pemukiman dan pada saat yang sama melestarikan fungsi ekosistem yang membantu mengurangi risiko;

h) Mendorong revisi dan praktik pengembangan kode bangunan, standar, rehabilitasi dan rekonstruksi yang baru pada tingkat nasional dan lokal yang bertujuan agar membuat

in the local context, particularly in informal and marginal human settlements, and reinforce the capacity to implement, survey and enforce such codes, through an appropriate approach, with a view to fostering disaster -resistant structures;

(i) Enhance the resilience of national health systems, including by integrating disaster risk management into primary, secondary and tertiary health care, especially at the local level; developing the capacity of health workers in understanding disaster risk and applying and implementing disaster risk reduction approaches in health work; and promoting and enhancing the training capacities in the field of disaster medicine; and supporting and training community health groups in disaster risk reduction approaches in health programmes, in collaboration with other sectors, as well as in the implementation of the International Health Regulations (2005) of the World Health Organization;

mereka lebih berlaku dalam konteks lokal, terutama dalam pemukiman informal dan marginal, dan memperkuat kapasitas untuk pelaksanaan survei dan menegakkan aturan-aturan tersebut melalui pendekatan yang tepat, untuk mengembangkan struktur yang tahan bencana;

i) Meningkatkan ketangguhan nasional dalam sistem kesehatan, termasuk dengan mengitegrasikan manajemen risiko bencana ka dalam pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, terutama di tingkat lokal; mengembangkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami risiko bencana serta menerapkan dan melaksanakan pengurangan risiko bencana dalam pendekatan pekerja kesehatan; dan mempromosikan dan meningkatkan kapasitas pelatihan bencana di bidang kedokteran; mendukung pelatihan kesehatan kepada kelompok masyarakat dalam pengurangan risiko bencana melalui pendekatan program kesehatan, bekerjasama dengan sektor lain, serta dalam mengimplementasikan peraturan kesehatan internasional dari

(j) Strengthen the design and implementation of inclusive policies and soci al safety-net mechanisms, including through community involvement, integrated with livelihood enhancement programmes, and access to basic health care services, including maternal, newborn and child health, sexual and reproductive health, food security and nutrition, housing and education, towards the eradication of poverty, to find durable solutions in the post-disaster phase and to empower and assist people disproportionately affected by disasters;

(k) People with life threatening and chronic disease, due to their particular needs, should be included in the design of policies and plans to manage their risks before, during and after disasters, including having access to life -saving services;

(l) Encourage the adoption of policies and programmes address ing disaster-induced human mobility to strengthen the resilience of affected people and

Organisasi Kesehatan Dunia (2005);

j) Memperkuat desain dan implementasi kebijakan inklusif dan mekanisme jaring pengaman sosial, termasuk melalui keterlibatan masyarakat, terintegrasi dengan program peningkatan penghidupan, dan akses ke pelayanan kesehatan dasar, termasuk ibu, bayi yang baru lahir dan kesehatan anak, kesehatan seksual dan reproduksi, ketahanan pangan dan gizi, perumahan dan pendidikan, pemberantasan kemiskinan, untuk menemukan solusi yang lebih tahan lama pada fase pasca bencana dan untuk memberdayakan dan membantu orang-orang yang terdampak bencana secara tidak proporsional;

k) Orang yang hidupnya terancam karena penyakit kronis, mengacu pada kebutuhan tertentu, harus dimasukkan dalam desain kebijakan dan perencanaan untuk mengelola risiko mereka sebelumnya, selama dan pasca bencana, termasuk memperoleh akses untuk pelayanan penyelamatan hidup;

l) Mendorong utnuk mengadopsi kebijakan dan program untuk mengatasi bencana yang disebabkan oleh mobilitas manusia untuk

that of host communities as per national laws and circumstances;

(m) Promote, as appropriate, the integration of disaster risk reduction considerations and measures in financial and fiscal instruments;

(n) Strengthen the sustainable use and management of ecosystems and implement integrated environmental and natural resource management approaches that incorporate disaster risk reduction;

(o) Increase business resilience and protection of livelihoods and productive assets throughout the supply chains. Ensure continuity of services and integrate disaster risk management into business models and practices;

(p) trengthen the protection of livelihoods and productive assets, including livestock, working animals, tools and seeds;

(q) Promote and integrate disaster risk management approaches throughout the tourism industry, given the often heavy reliance on touri sm as a key

memperkuat ketangguhan masyarakat yang terkena dampak komunitas yang menjadi tuan rumah sesuai dengan situasi dan hukum nasional;

m) Mempromosikan dengan mempertimbangkan integrasi pengurangan risiko bencana dan langkah-langkah finansial dan instrumen fiskal;

n) Memperkuat pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem dan penerapkan manajemen pendekatan sumber daya alam dan lingkungan yang terpadu yang digabungkan dalam pengurangan risiko bencana;

o) Meningkatkan ketangguhan sektor bisnis dan perlindungan penghidupan dan aset produksi diseluruh rantai pasokan. Menjamin kelangsungan layanan dan mengintegrasikan manajemen risiko bencana dalam model bisnis dan praktek;

p) Memperkuat perlindungan penghidupan dan aset produktif, termasuk ternak, hewan pekerja, alat dan bibit;

q) Mempromosikan dan mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko bencana di seluruh sektor industri pariwisata, mengingat tingginya tigkat

economic driver.

Global and regional levels

31. To achieve this, it is important to:

(a) Promote coherence across systems, sectors and organizations related to sustainable development and to disaster risk reduction in their policies, plans, programmes and processes;

(b) Promote the development and strengthening of disaster risk transfer and sharing mechanisms and instruments in close cooperation with partners in the international community, business, international financial institutions and other relevant stakeholders;

(c) Promote cooperation between academic, scientific and research entities and networks and the private sector to develop new products and services to help reduce disaster risk, in particular those that would assist developing countries and their specific challenges;

(d) Encourage the coordination between

ketergantungan sektor turis sebagai kunci pendorong utama perekonomian;

Tingkat global dan regional

31. Untuk mencapai ini, penting untuk:

a) Mempromosikan sistem menyeluruh yang kojeren, sektor dan organisasi yang terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan, perencanaan, program dan prosesnya;

b) Mempromosikan pengembangan dan penguatan transfer risiko bencana dan mekanisme berbagi serta instrumen dalam kerjasama yang erat dengan mitra dalam komunitas internasional, bisnis, lembaga keuangan internasional dan pihak terkait lainnya;

c) Mempromosikan kerjasama antara entitas akademis, ilmiah dan peneliti serta jaringan dan sektor swasta untuk mengembangkan produk dan layanan baru untuk membantu mengurangi risiko bencana, khususnya mereka yang akan membantu negara-negara berkembang dengan tantangan khususnya;

d) Mendorong koordinasi antara lembaga-lembaga keuangan global dan regional

global and regional financial institutions with a view to assessing and anticipating the potential economic and social impacts of disasters;

(e) Enhance cooperation between health authorities and other relevant stakeholders to strengthen country capacity for disaster risk management for health, the implementation of the International Health Regulations (2005) and the building of resilient health systems;

(f) Strengthen and promote the collaboration and capacity -building for the protection of productive assets including livestock, working animals, tools and seeds;

(g) Promote and support the development of social safety nets as disaster risk reduction measures linked to and integrated with livelihood enhancement programmes in order to ensure resilience to shocks at the household and community levels;

(h) Strengthen and broaden international efforts aimed at eradicating hunger and poverty through disaster risk reduction;

untuk menilai dan mengantisipasi potensi dampak ekonomi dan sosial akibat bencana;

e) Meningkatkan kerjasama antara otoritas kesehatan dan stakeholder yang relevan untuk memperkuat kapasitas negara dalam manajemen risiko bencana bagi seektor kesehatan, pelaksanaan peraturan kesehatan internasional (2005) dan membangun ketangguhan sistem kesehatan;

f) Memperkuat dan mempromosikan kerjasama dan pembangunan kapasitas utnuk melindungi aset produktif termasuk kebutuhan hidup, hewan pekerja, peralatan dan bibit;

g) Mempromosikan dan mendukung pengembangan jaring pengaman sosial sebagai langkah-langkah pengurangan risiko bencana terkait dengan mengintegrasikan program peningkatan penghidupan untuk memastikan ketangguhan terhadap guncangan ditingkat rumah tanggak dan komunitas;

h) Memperkuat dan memperluas upaya-upaya internasional untuk mengentaskan kelaparan dan kemiskinan melalui pengurangan risiko bencana;

(i) Promote and support collaboration among relevant public and private stakeholders to enhance the resilience of business to disasters.

i) Mempromosikan dan mendukung kolaborasi antara stakeholder publik dan swasta yang relevan untuk meningkatkan ketahan bisnis dari bencana.

Priority 4. Enhancing disaster preparedness for effective response and to "Build Back Better" in recovery, rehabilitation and reconstruction

32. The steady growth of disaster risk, including the increase of people and assets exposure, combined with the lessons learned from past disasters, indicates the need to further strengthen disaster preparedness for response, take action in anticipation of events, integrate disaster risk reduction in response preparedness and that ensure capacities are in place for effective response and recovery at all levels. Empowering women and persons with disabilities to publicly lead and promote gender equitable and universally accessible response, recovery rehabilitation and reconstruction approaches are key. Disasters have

Prioritas 4: Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana untuk Respon yang Efektif dan untuk "Membangun Kembali dengan Lebih Baik" dalam Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

32. Pertumbuhan risiko bencana yang stabil, termasuk meningkatnya orang dan aset yang terpapar, dikombinasikan dengan pembelajaran bencana di masa lalu, menunjukkan kebutuhan untuk lebih memperkuat kesiapsiagaan bencana dan respon, dengan mengambil tindakan untuk mengantisipasi kejadian, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam kesiapan serta memastikan kapasitas respon dan pemulihan yang efektif di semua tingkatan. Memberdayakan perempuan dan penyandang cacat bagi kepemimpinan publik dan mempromosikann keadilan gender dan akses terhadap respon yang berlaku umum, pendekatan rehabilitasi pemulihan dan rekonstruksi

demonstrated that the recovery, rehabilitation and reconstruction phase, which needs to be prepared ahead of the disaster, is a critical opportunity to build back better, including through integrating disaster risk reduction into development measures, making nations and communities resilient to disasters.

National and local levels

33. To achieve this, it is important to:

(a) Prepare or review and periodically update disaster preparedness and contingency policies, plans and programmes with the involvement of the relevant institutions, considering climate change scenarios and their impact on disaster risk, and facilitating, as appropriate, the participation of all sectors and relevant stakeholders;

(b) Invest in, develop, maintain and strengthen people -centred multi-hazard, multisectoral forecasting and early warning systems, disaster risk and emergency communications mechanisms,

adalah kunci. Bencana telah menunjukkan bahwa tahap pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi perlu disiapkan menjelang bencana, hal ini merupakan peluang penting untuk membangun kembali dengan lebih baik, termasuk dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam langkah-langkah pembangunan, membuat bangsa dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

Tingkat nasional dan lokal

33. Untuk mencapai hal ini, penting untuk:

a) Menyiapkan atau mereview dan memperbarui kebijakan kesiapsiagaan dan kontijensi, perencanaan dan program dengan melibatkan institusi yang relevan, mempertimbangkan skenario perubahan iklim dan dampaknya terhadap risiko bencana, serta memfasilitasi partisipan dari semua sektor dan stakeholder yang relevan;

b) Berinvestasi dalam mengembangkan, memeliharan dan memperkuat multi-hazard dengan fokus pada manusianya, perkiraan multi-sektoral dan sistem peringatan dini, mekanisme

social technologies and hazard - monitoring telecommunications systems. Develop such systems through a participatory process. Tailor them to the needs of users, including social and cultural requirements , in particular gender. Promote the application of simple and low -cost early warning equipment and facilities and broaden release channels for natural disaster early warning information;

(c) Promote the resilience of new and existing critical infrastructure, including water, transportation and telecommunications infrastructure, educational facilities, hospitals and other health facilities, to ensure that they remain safe, effective and operational during and after disasters in order to provide live -saving and essential services;

(d) Establish community centres for the promotion of public awareness and the stockpiling of necessary materials to implement rescue and relief activities;

risiko bencana dan komunikasi darurat, tekhnologi sosial dan monitoring bahaya dari sistem telekomunikasi. Mengembangkan sistem tersebut melalui proses partisipatif. Menyesuaikannya dengan kebutuhan pengguna, termasuk persyaratan sosial dan budaya, gender tertentu. Mempromosikan penerapan secara sederhana dan biaya rendah untuk peralatan peringatan dini dan fasilitas serta memperluas saluran rilis informasi peringatan dini bencana alam;

c) Mempromosikan ketangguhan infrastruktur penting yang baru dan yang sudah ada, termasuk air, transportasi dan infrastruktur telekomunikasi, fasilitas pendidikan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk memastikan bahwa mereka tetap aman, efektif dan operasional selama dan setelah bencana untuk memberikan pelayanan penting menyelamatkan nyawa.

d) Membangun pusat-pusat komunitas untuk mempromosikan kesadaran masyarakat dan menyimpan bahan yang diperlukan selama proses penyelamayan dan aktivitas meberikan

(e) Adopt public policies and actions that support the role of public service workers to establish or strengthen coordination and funding mechanisms and procedures for relief assistance and to plan and prepare for post -disaster recovery and reconstruction;

(f) Train the existing workforce and voluntary workers in disaster response and strengthen technical and logistical capacities to ensure better response in emergencies;

(g) Ensure the continuity of operations and planning, including social and economic recovery, and the provision of basic services in the post -disaster phase;

(h) Promote regular disaster preparedness, response and recovery exercises, including evacuation drills, training and the establishment of area -based support systems, with a view to ensuring rapid and effective response to disasters and related displacement, including access to safe shelter, essential food and non -food relief supplies, as appropriate to local

bantuan;

e) Mengadopsi kebijakan publik dan tindakan yang mendukung peran pekerja layanan publik untuk membangun dan memperkuat koordinasi dan mekanisme pendanaan serta prosedur untuk bantuan darurat dan untuk merencanakan serta mempersiapkan proses pemulihan pasca bencanana dan rekonstruksi;

f) Melatih tenaga kerja yang adan dan tenaga sukarela dalam menanggapi bencana dan memperkuat kapasitas teknis dan logistik untuk memastikan respon yang lebih baik dalam keadaan darurat;

g) Menjamin kelangsungan operasional dan perencanaan, termasuk pemulihan aspek sosial dan ekonomi, serta menyediakan layanan dasar pada fase pasca bencana;

h) Mempromosikan kesiapsiagaan untuk bencana sehari-hari, latihan respon dan pemulihan, termasuk latihan evakuasi, pelatihan dan pembentukan sistem pendukung berbasis daerah, untuk memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap bencana dan terkait pengungsian, termasuk akses

needs;

(i) Promote the cooperation of diverse institutions, multiple aut horities and related stakeholders at all levels, including affected communities and business, in view of the complex and costly nature of post -disaster reconstruction, under the coordination of national authorities;

(j) Promote the incorporation of disaster risk management into post-disaster recovery and rehabilitation processes, facilitate the link between relief, rehabilitation and development. Use opportunities during the recovery phase to develop capacities that reduce disaster risk in the short, med ium and long term, including through the development of measures such as land use planning, structural standards improvement and the sharing of expertise, knowledge, post -disaster reviews and lessons learned. Integrate post -disaster reconstruction into the economic and social sustainable development of affected areas. This should also apply to temporary settlements for persons displaced by

ke tempat penampungan yang aman, makanan pokok dan pasokan bantuan yang bukan makanan, yang sesuai dengan kebutuhan lokal;

i) Mempromosikan kerjasama lembaga yang beragam, otoritas yang berjenjang dan stakeholder yang relevan di semua tingkatan, termasuk komunitas dan sektor usaha yang terdampak, mengingat sifatnya yang kompleks dan berbiaya tinggi dalam rekonstruksi pasca bencana, di bawah koordinasi otoritas nasional;

j) Mempromosikan penggabungan manajemen risiko bencana ke dalam pemulihan pasca bencana dan proses rehabilitasi, memfasilitasi menghungunkan bantuan yang ada, rehabilitsai dan pembangunan. Menggunakan kesempatan selama tahap pemulihan untuk mengembangkan kapasitas yang mengurangi risiko bencana dalam jangka pendek, menengah dan panjang, termasuk melalui pengembangan langkah-langkah seperti perencanaan penggunaan lahan, peningkatan standar bangunan dan berbagai keahlian, pengetahuan, ulasan dan pembelajaran pasca

disaster;

(k) Develop guidance for preparedness for disaster reconstruction, such as on land use planning and structural standards improvement, including by learning from the recovery and reconstruction programmes over the decade since the adoption of the Hyogo Framework for Action, and exchanging experiences, knowledge and lessons learned;

(l) Consider the relocation of public facilities and infrastructures to areas outside the risk range, wherever possible, in the post -disaster reconstruction process, in consultation with the people concerned, as appropriate;

(m) Strengthen the capacity of local authorities to evacuate persons living in disaster-prone areas;

(n) Establish a mechanism of case registry and a database of mortality caused by disaster in order to improve the

bencana. Mengintegrasikan rekonstruksi pasca bencana ke pembangunan yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi dan sosial di daerah yang terdampak. Hal ini juga berlaku untuk pemukiman sementara bagi para pengungsi akibat bencana;

k) Mengembangkan pedoman untuk kesiapsiagaan dalam rekonstruksi bencana, seperti perencanaan penggunaan lahan dan meningkatan standar bangunan, termasuk dengan belajar dari program pemulihan dan rekonstruksi yang lebih dari satu dekade sejak penerapan Kerangka Aksi Hyogo, dan bertukar pengalaman, pengetahuan dan pembelajaran;

l) Mempertimbangkan sarana relokasi fasilitas publik dan infrastruktur untuk area-area diluar jangkauan risiko, jika memungkinkan dalam proses rekonstruksi pasca bencana dengan mengkonsultasikan dengan fokus pada manusianya;

m) Menguatkan kapasitas dati otoritas lokal untuk mengevakuasi orang yang hidup di daerah rawan bencana;

n) Membangun mekanisme pendaftaran kasus dan data base kematian yang disebabkan oleh bencana dalam

prevention of morbidity and mortality;

(o) Enhance recovery schemes to provide psychosocial support and mental health services for all people in need;

(p) Review and strengthen, as appropriate, national laws and procedures on international cooperation, based on the guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial recovery assistance.

Global and regional levels

34. To achieve this, it is important to:

(a) Develop and strengthen, as appropriate, coordinated regional approaches and operational mechanisms to prepare for and ensure rapid and effective disaster response in situations that exceed national coping capacities;

(b) Promote the further development and dissemination of instruments, such as standards, codes, operational guides and other guidance instruments to support coordinated action in disaster preparedness and response and facilitate

rangka mencegah peningkatan angka insiden dan kematian;

o) Meningkatkan skema pemulihan untuk meberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan mental untuk semua orang yang membutuhkan;

p) Meninjau dan memperkuat hukum nasional dan prosedur kerjasama internasional berdasarkan pedoman untuk memfasilitasi dalam negeri dan kebijakan penanggulangan bencana internasional dan bantuan pemulihan awal.

Tingkat global dan regional

34. Untuk mencapai ini, penting untuk:

a) Mengembangkan dan memperkuat pendekatan koordinasi regional yang sesuai dan mekanisme operasional untuk mempersiapkan dan memastikan respon bencana yang cepat dan efektif dalam situasi melebihi kapasitas nasional untuk ditangani;

b) Mempromosikan perkembangan lebih lanjut penyebaran instrumen, seperti standar, kode, panduan operasional dan instrumen panduan lainnya untuk mendukung tindakan terkoordinasi

information sharing on lessons learned and best practices for policy practice and post -disaster reconstruction programmes;

(c) Promote the further development of and investment in effective, nationally-compatible, regional multi-hazard early warning mechanisms, where relevant, in line with the Global Framework for Climate Services, and facilitate the sharing and exchange of information across all countries;

(d) Enhance international mechanisms, such as the International Recovery Platform, for the sharing of experience and learning among countries and all relevant stakeholders;

(e) Support, as appropriate, relevant United Nations entities to strengthen and implement global mechanisms on hydrometeorological issues, in order to raise awareness and improve understanding of water -related disaster risks and their impact on society, and advance strategies for disaster risk reduction upon request of States;

(f) Support regional cooperation to deal with

dalam kesiapsiagaan dan tanggap bencana serta memfasilitasi berbagi informasi tentang berbagai pembelajaran dan praktik baik bagi praktik kebijakan dan program rekonstruksi pasca bencana;

c) Mempromosikan perkembangan lebih lanjut dan investasi dalam kemampuan nasional yang efektif, mekanisme peringatan dini yang multi-hazard di tingkat regional, sejalan dengan kerangka kerja global untuk layanan iklim, serta memfasilitasi pertukanan dan berbagi informasi dengan seluruh negara-negara;

d) Meningkatkan mekanisme internasional seperti platform pemulihan internasional untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran antara negara-negara dan seluruh stakeholder yang relevan;

e) Dukungan, seperti, badan PBB yang relevan untuk memperkuat dan menerapkan mekanisme global isu hidrometeorologi, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko bencana terkait air dan dampaknya terhadap masyarakat, serta strategi yang lebih maju untuk penguranagn risiko bencana atas permintaan dari

disaster preparedness, including through common exercise and drills;

(g) Promote regional protocols to facilitate sharing of response capacities and resources during and after disasters;

(h) Train the existing workforce and volunteers in disaster response.

negara;

f) Mendukung kerjasama regional untuk menyepakati kesiapsiagaan bencana termasuk latihan bersama dan simulasi;

g) Mempromosikan protokol regional untuk memfasilitasi berbagi kapaasitas terkait respon dan sumber daya pada saat dan setelah bencana;

h) Melatih tenaga kerja dan relawan yang ada dalam tanggap bencana.

V. Role of stakeholders

35. While States have the overall responsibility for reducing disaster risk, it is a shared responsibility between Governments and relevant stakeholders. In particular, non-state stakeholders play an important role as enablers in providing support to States, in accordance with national policies, laws and regulations, in the implementation of the framework at local, national, regional and global levels. Their commitment, goodwill, knowledge, experience and resources will be required.

36. When determining specific roles and

V. Peran Stakeholder

35. Sementara negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurangi risiko bencana, hal itu merupak tanggung jawab bersama antara pemerinta dan stakeholder yang relevan. Secara khusus, stakeholder non-pemerintah memainkan peran penting yang memungkinkan untuk memberikan dukungan kepada negara, sesuai dengan kebijakan nasional, hukum dan peraturan, dalam pelaksanaan kerangka kerja di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Komitmen mereka, niat baik, pengetahuan, pengalaman dan sumber daya yang akan dibutuhkan.

responsibilities for stakeholders, and at the same time building on existing relevant international instruments, States should encourage the following actions on the part of all public and private stakeholders:

(a) Civil society, volunteers, organized voluntary work organizations and community-based organizations to: participate, in collaboration with public institutions, to, inter alia, provide specific knowledge and pragmatic guidance in the context of the development and implementation of normative frameworks, standards and plans for disaster risk reduction; engage in the implementation of local, national, regional and global plans and strategies; contribute to and support public awareness, a culture of prevention and education on disaster risk; and advocate for resilient communities and an inclusive and all-of-society disaster risk management which strengthen the synergies across groups, as appropriate. On this point, it should be noted that:

(i) Women and their participation are critical to effectively managing

36. Ketika menentukan peran khusus dan tanggu jawab stakeholder, pada saat yang sama membangun instrumen internasional yang relevan, negara seharusnya mendorong tindakan kepentingan semua stakeholder publik dan swasta, sebagai berikut:

a) Masyarakat sipil, sukarelawan, kerja relawan yang terorganisir dan organisasi berbasis masyarakat: berpartisipasi, bekerjasama dengan lembaga-lembaga publik untuk, diantaranya, menyediakan pengetahuan khusus dan panduan pragmatis dalam konteks pengembangan dan implementasi kerangka normatif, standar dan rencana penguranagn risiko bencana; terlibat dalam pelaksanaan rencana dan strategi lokal, nasional, regional dan global; berkontribusi dan mendukung penyadaran masyarakat, budaya pencegahan dan pendidikan tentang risiko bencana; dan advokasi bagi ketangguhan masyarakat dan inklusif dan semua yang berasal dari masyarakat untuk memperkuat sinergi antar kelompok dalam manajemen risiko bencana. Pada titik ini. Perlu dicatat bahwa:

disaster risk and designing, resourcing and implementing gender-sensitive disaster risk reduction policies, plans and programmes; and adequate capacity building measures need to be taken to empower women for preparedness as well as build their capacity for alternate livelihood means in post-disaster situations;

(ii) Children and youth are agents of change and should be given the space and modalities to contribute to disaster risk reduction, in accordance with legislation, national practice and educational curricula;

(iii) Persons with disabilities and their organizations are critical in the assessment of disaster risk and in designing and implementing plans tailored to specific requirements, taking into consideration, inter alia, the principles of universal design;

i. Perempuan dan partisipasi mereka sangat penting untuk secara efektif mengelola risiko dan mendesain bencana, sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana, rencana dan program yang sensitif gender; dan langkah-langkah pengembangan kapasitas yang memadai harus diambil untuk memberdayakan perempuan untuk kesiapsiagaan serta membangun kapasitas mereka sebagai alternatih penghidupan yang cukup berbarti dalam situasi pasca bencana;
ii. Anak-anak dan remaja adalah agen perubahan dan harus diberikan ruang dan modalitas untuk berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana, sesuai dengan undang-undang, praktik nasional dan kurikulum pendidik;
iii. Penyandang cacat dan organisasinya sangat penting dalam penilaian risiko bencana dan dalam merancanag dan melaksanakan rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan

(iv) Older persons have years of knowledge, skills and wisdom, which are invaluable assets to reduce disaster risk, and they should be included in the design of policies, plans and mechanisms, including for early warning;

(v) Indigenous peoples, through their experience and traditional knowledge, provide an important contribution to the development and implementation of plans and mechanisms, including for early warning;

(vi) Migrants contribute to the resilience of communities and societies and their knowledge, skills and capacities can be useful in the design and implementation of disaster risk reduction.

(b) Academia, scientific and research entities and networks to: focus on

tertentu, dengan mempertimbangkan, antara lain, prinsip-prinsip desain universal;

iv. Orang tua memiliki waktu tahuanan untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan kebijaksanaan, yang merupakan aset berharga untuk mengurangi risiko bencana, dan mereka harus dimasukkan dalam desain kebijakan, perencanaan dan mekanisme, termasuk untuk peringatan dini;

v. Masyarakat adat, melalui pengalaman dan pengetahuan tradisional, memberikan kontribusi penting untuk pengembangan dan implementasi perencanaan dan mekanisme, termasuk untuk peringatan dini;

vi. Kontribusi pekerja migran terhadap ketangguhan komunitas, masyarakat dan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki dapat berguna dalam mendesain dan pelaksanaan pengurangan risiko bencna.

b) Akademisi, lembaga ilmiah dan jaringan peneliti untuk: fokus pada

the disaster risk factors and scenarios, including emerging disaster risks, in the medium and long term; increase research for regional, national and local application; support action by local communities and authorities; and support the interface between policy and science for decision-making;

(c) Business, professional associations and private sector financial institutions, including financial regulators and accounting bodies, as well as philanthropic foundations, to: integrate disaster risk management, including business continuity, into business models and practices via disaster risk-informed investments, especially in micro, small and medium-sized enterprises; engage in awareness-raising and training for their employees and customers; engage in and support research and innovation as well as technological development for disaster risk management; share and disseminate knowledge, practices and non-sensitive data; and actively participate, as appropriate and under

faktor-faktor risiko bencana dan skenario, termasuk kemuncula risiko bencana dalam jangka menengah dan panjang; meningkatkan penelitian untuk diaplikasikan di tingkat regional, nasional dan lokal; mendukung aksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah; dan mendukung pertemuan tatap muka antara kebijakan dan ilmu pengetahuan untuk pembuat keputusan;

c) Sektor bisnis, asosiasi profesi dan lembaga keuangan swasta, termasuk regulator finansial badan akuntansi, serta yayasan amal, untuk: mengintegrasikan manajemen risiko bencana, termasuk kelangsungan bisnis, menjadi model bisnis dan praktik investasi yang terinformasikan risiko bencana, terutama dalam skala mikro, usaha kecil dan menengah, terlibat dalam peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan dan pelanggan; terlibat dan mendukung penelitian dan inovasi serta pengembangan tekhnologi untuk manajemen risiko bencana; ikut berbagi dan meyebarluaskan pengetahuan, praktik dan data yang

the guidance of the public sector, in the development of normative frameworks and technical standards that incorporate disaster risk management;

(d) Media to: take an active and inclusive role at local, national, regional and global levels in contributing to the raising of public awareness and understanding, and disseminate accurate and non-sensitive disaster risk, hazard and disaster information, including on small-scale disasters, in a simple, transparent, easy-to-understand and accessible manner, in close cooperation with national authorities; adopt specific disaster risk reduction communication policies; support, as appropriate, early warning systems and life-saving protective measures; and stimulate a culture of prevention and strong community involvement in sustained public education campaigns and public consultations at all levels of society, in accordance with national practices.

tidak sensitif; dan berpartisipasi aktif, secara sesuai dan di bawah bimbingan sektor publik, dalam pengembangan kerangka normatif dan standar teknis yang menggabungkan manajemen risiko bencana;

d) Media; mengambil peran aktif dan inklusif di tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, dan menebarkan informasi yang tidak sensitif, akurat terkait risiko bencana, hazard dan bencana, termasuk bencana skala kecil, secara sederhana, transparan dan mudah untuk dipahami dan mudah di akses dengan bekerja sama dengan otoritas nasional; mengadopsi kebijakan komunikasi yang spesifik terkait pengurangan risiko bencana; dukungan seperti sistem peringatan dini yang tepat dan upaya perlindungan untuk menyelamatkan nyawa; dan merangsang budaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat yang kuat dalam kampanye yang berkelanjutan melalui pendidikan publik dan konsultasi publik di semua tingkatan masyarakat sesuai dengan praktik

nasional;

37. With reference to the General Assembly resolution 68/211 of 20 December 2013, commitments by relevant stakeholders are important to identify modalities of cooperation and implement this framework. Those commitments should be specific and time-bound in order to support the development of partnerships at local, national, regional and global levels and the implementation of local and national disaster risk reduction strategies and plans. All stakeholders are encouraged to publicize their commitments and their fulfilment in support of the implementation of the framework, or of the national and local disaster risk management plans, through the website of the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR).

37. Dengan mengacu pada resolusi Majelis Umum 68/211 tanggal 20 Desember 2013 tentang komitmen stakeholder yang relevan yang penting untuk mengidentifikasi modalitas kerjasama dan menerapkan kerangka kerja ini. Komitmen tersebut harus spesifik dan terikat waktu dalam rangka mendukung pengembangan kemitraan di tingkat lokal, nasional, regional dan global serta pelaksanaan strategi dan rencana pengurangan risiko bencana lokal dan nasional. Semua stakeholder di dorong untuk mempublikasikan komitmen mereka dan pemenuhannya dalam mendukung pelaksanaan kerangka kerja, atau rencana manajemen risiko bencana nasional dan lokal, melalui website Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR).

VI. International cooperation and global partnership

General considerations

38. Given their different capacities as well as

VI. Kerjasama Internasional dan Kemitraan Global

Pertimbangan Umum

38. Mengingat kapasitas mereka yang berbeda

the linkage between the level of support provided to them and the extent to which they will be able to implement the present framework, developing countries require enhanced provisions of means of implementation, including adequate, sustainable, and timely resources, through international cooperation and global partnership for development, and continued international support, to strengthen their efforts to reduce disaster risk.

39. International cooperation for disaster risk reduction includes a variety of sources and is a critical element in supporting the efforts of developing countries to reduce disaster risk.

40. In addressing economic disparity and disparity in technological innovation and research capacity among countries it is crucial to enhance technology transfer involving a process of enabling and facilitating flows of skill, knowledge, ideas, know-how and technology from developed to developing countries in the implementation of the present framework.

41. Disaster-prone developing countries, in particular the least developed countries,

serta hubungan antara tingkat dukungan yang diberikan dan sejauh mana mereka akan dapat menerapkan kerangka kerja ini, negara-negara berkembang membutuhkan peningkatan ketentuan terkait sarana pelaksanaan, termasuk keberlanjutannya, dan sumber daya, tepat waktu melalui kerjasama internasional dan kemitraan global untuk pembangunan serta dukungan internasional yang berkelanjutan untuk memperkuat upaya mereka dalam mengurangi risiko bencana.

39. Kerjasama internasional untuk pengurangan risiko bencana meliputi berbagai sumber dan merupakan elemen penting dalam mendukung upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi risiko bencana.

40. Dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan dalam inivasi teknoligi serta kapasitas penelitian antara negara-negara sangat penting untuk meningkatkan transfer teknologi yang melibatkan proses yang memungkinkan dan memfasilitasi arus ketrampilan, pengetahuan, ide, pemahaman dan teknologi dari negara maju ke negara berkembnag dalam pelaksanaan kerangka kerja ini.

41. Negara-negara yang rawan bencana, khususnya negara-negara berkembang,

small island developing States, landlocked developing countries and African countries, as well as middle-income countries facing specific challenges, warrant particular attention in view of their higher vulnerability and risk levels, which often greatly exceed their capacity to respond to and recover from disasters. Such vulnerability requires the urgent strengthening of international cooperation and ensuring genuine and durable partnerships at the regional and international levels in order to support developing countries to implement this framework in accordance with their national priorities and needs. Similar attention and appropriate assistance should also be extended to other disaster-prone countries with specific characteristics, such as archipelagic countries, as well as countries with extensive coastlines.

42. Disasters can disproportionately affect small island developing States, due to their unique and particular vulnerabilities. The effects of disasters, some of which have increased in intensity and have been exacerbated by climate change, impede

negara kepulauan kecil, negara-negara berkembang di benua dan negara-negara Afrika, serta negara-negara dengan pendapatan menengah serta menghadapi tantangan tertentu, menjamin perhatian khusus mengingat kerentanan dan risiko pada tingkat yang lebih tinggi yang sering kali jauh melampaui kapasitas mereka untuk melakukan respon dan pemulihan dari bencana. Kerentanan tersebut memerlukan penguatan mendesak kerjasama internasional dan memastikan kemitraan yang tulus dan tahan lama di tingkat regional dan internasional untuk mendukung negara-negara berkembang untuk menerapkan kerangka kerja ini sesuai dengan prioritas dan kebutuhan nasional mereka. Perhatian yang sama dan bantuan yang sesuai juga harus diperluas kenegara-negara lain yang berada di kawasan rentan bahaya yang memiliki karakteristik tertentu, seperti negara-negara kepulauan, serta negara-negara dengan garis pantai yang panjang.

42. Bencana dapat terjadi secara tidak proporsional dan mempengaruhi negara berkembang yang berbentuk kepulauan kecil karena kerentanan dan kekhususannya. Dampak bencana, beberapa diantaranya telah menigkat

their progress towards sustainable development. Given the special case of small island developing States, there is a critical need to build resilience and to provide particular support through the implementation of the outcome of the SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway[9] in the area of disaster risk reduction.

43. African countries continue to face challenges related to disasters and increasing risks, including those related to enhancing resilience of infrastructure, health and livelihoods. These challenges require increased international cooperation and the provision of adequate support to African countries, to allow for the implementation of this framework.

44. North-South cooperation, complemented by South-South and triangular cooperation, has proven to be key to reducing disaster risk and there is a need to strengthen cooperation in both areas further. Partnerships play an additional important role by harnessing the full

dalam intensitas yang telah diperburuk oleh perubahan iklim, menghambat kemajuan mereka untuk pembangunan yang berkelanjutan, mengingat kasus khusus negara kepulauan kecil, ada kebutuhan penting untuk membangun ketangguhan dan memberikan dukungan khususnya melalui penerapan hasil dari SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA)[9] dalam bidang pengurangan risiko bencana.

43. Negara-negara di Afrika harus menghadapi tantangan yang berkaitan dengan bencana dan meningkatnya risiko, termasuk yang terkait dengan peningkatan ketahanan infrastruktur, kesehatan dan penghidupan. Tantangan-tantangan ini membutuhkan peningkatan kerjasama internasional dan menyediakan dukungan yang memadai untuk negara-negara di Afrika agar memungkinkan untuk mengimplementasikan kerangka kerja ini.

44. Kerjasama Utara - Selatan, dilengkapi dengan Selatan - Selatan dan kerjasama Segitiga, telah terbukti menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana dan ada kebutuhan untuk memperkuat kerjasama lebih lanjut di kedua kawasan. Kemitraan

[9] **General Assembly resolution 69/15, annex.**

potential of countries and supporting their national capacities in disaster risk management and in improving the social, health and economic well-being of individuals, communities and countries.

45. Efforts by developing countries offering South-South and triangular cooperation should not reduce North-South cooperation from developed countries as they complement North-South cooperation.

46. Financing from a variety of international sources, public and private transfer of reliable, affordable, appropriate and modern environmentally sound technology, on concessional and preferential terms as mutually agreed; capacity-building assistance for developing countries; and enabling institutional and policy environments at all levels are critically important means of reducing disaster risk.

Means of implementation

47. To achieve this, it is necessary to:

(a) Reaffirm that developing countries

memainkan peran penting selain memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh negara juga mendukung kapasitas nasional dalam manajemen risiko bencana dan dalam meningkatkan sektor sosial, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi individu, komunitas dan negara.

45. Upaya negara-negara berkembang yang menawarkan kerjasama Selatan - Selatan dan kerjasama Segitiga semestinya tidak mengurangi kerjasana Utara - Selatan dari negara maju yang melengkapi kerjasama Utara - Selatan.

46. Pembiayaan dari berbagai sumber internasional, transfer teknologi ramah lingkungan antara publik dan swasta yang handal, terjangkau, repat dan modern merupakan prasyarat konsesi dan preferensi yang disepakati bersama; pengembangan kapasitas bantuan untuk negara-negara berkembang; serta memungkinkan pelembagaan lingkungan dan kebijakan pada semua tingkatan sebagai sarana penting untuk mengurangi risiko bencana.

Sarana Implementasi

47. Untuk mencapai ini, diperlukan:

need enhanced provision of coordinated, sustained, and adequate international support for disaster risk reduction, in particular for the least developed countries, small island developing States, landlocked developing countries and African countries, as well as middle-income countries facing specific challenges, through bilateral and multilateral channels, including through enhanced technical and financial support, and technology transfer on concessional and preferential terms as mutually agreed, for the development and strengthening of their capacities;

(b) Enhance access of states, in particular developing countries to finance, environmentally sound technology, science and inclusive innovation, as well as knowledge and information-sharing through existing mechanisms, namely bilateral, regional and multilateral collaborative arrangements, including the United Nations and other relevant bodies;

a) Menegaskan kembali bahwa negara-negara berkembang perlu menyempurnakan koordinasi, berkelanjutan, dan dukungan internasional yang memadai untuk pengurangan risiko bencana, khususnya untuk negara-negara berkembang, negara pulau-pulau kecil, negara yang berada ditengah benua dan negara-negara di Afrika, serta negara-negara dengan pendapatan menengah yang memiliki tantangan tertentu, melalui jalur bilateral dan multilateral, termasuk melalui peningkatan bantuan teknis dan finansial, dan transfer teknologi pada persyaratan konsesi dan preferensi yang disepakati bersama, untuk pengembangan dan penguatan kapasitas mereka;
b) Meningkatkan akses negara, khususnya negara-negara berkembang untuk finansial, teknologi ramah lingkungan, ilmu pengetahuan dan inovasi inklusif, serta pengetahuan dan berbagi informasi melalui mekanisme yang ada, yaitu bilateral, regional dan multilateral yang dirancang secara kolaboratif, termasuk PBB dan lembaga relevan lainnya;

(c) Promote the use and expansion of thematic platforms of cooperation such as global technology pools and global systems to share know-how, innovation and research and to ensure access to technology and information in disaster risk reduction.

(d) Incorporate disaster risk reduction measures into multilateral and bilateral development assistance programmes within and across all sectors, as appropriate, related to poverty reduction, sustainable development, natural resource management, environment, urban development and adaptation to climate change;

c) Mempromosikan penggunaandan perluasan kerjasama platform tematik seperti pusat teknologi global dan sistem global untuk berbagi pemahaman, inovasi dan penelitian serta untuk menjamin akses ke teknologi dan informasi dalam pengurangan risiko bencana.

d) Menggabungkan langkah-langkah pengurangan risiko bencana ke dalam program-program bantuan multilateral dan bilateral di semua sektor terkait dengan pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, pembangunan kawasan urban dan adaptasi terhadap perubahan iklim;

Support from international organizations

48. To support the implementation of this framework, the following is necessary:

(a) The United Nations and other international and regional organizations, international and regional financial institutions and donor agencies engaged in disaster risk reduction are requested, as appropriate, to enhance the

Dukungan dari Organisasi Internasional

48. Untuk mendukung implementasi kerangka kerja ini, dibutuhkan hal-hal sebagai berikut:

a) PBB dan organisasi internasional dan regional lainnya, lembaga keuangan internasional dan regional dan lembaga donor yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana diminta untuk meningkatkan koordinasi

coordination of their strategies in this regard;

(b) The entities of the United Nations system, including the funds and programmes and the specialized agencies, through the United Nations Plan of Action on Disaster Risk Reduction for Resilience, United Nations Development Assistance Frameworks and country programmes to promote the optimum use of resources and to support developing countries, at their request, in the implementation of this framework, in coordination with other relevant frameworks, such as the International Health Regulations (2005), including through the development and the strengthening of capacities, and clear and focused programmes that support the priorities of States in a balanced, well-coordinated and sustainable manner, within their respective mandates;

(c) The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), in particular, to support the implementation, follow-up and review of this framework through: preparing periodic reviews on progress, in

strategi mereka dalam hal tersebut;

b) Entitas sistem PBB, termasuk dana dan program serta badan-badan khusus, malaui rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana PBB untuk ketangguhan, kerangka bantuan pembangunan PBB dan program nasional agar mempromosikan penggunaan sumber daya secara optimal dan mendukung negara-negara berkembang, atas permintaan mereka dalam implementasi kerangka kerja ini, dan dikoordinasikan dengan kerangka kerja terkait lainnya seperti Peraturan Kesehatan Internasional (2005), termasuk melalui pengembangan dan penguatan kapasitas dan terfokus pada program yang mendukung prioritas negara secara seimbang, koordinasi yang baik dan berkelanjutan sesuai dengan mandat mereka masing-masing;

c) Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR), dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan, tindak lanjut dan review kerangka ini melalui: mempersiapkan review berkala terkait kemajuan, khususnya untuk Platform

particular for the Global Platform and, as appropriate, in a timely manner with the follow-up process at the United Nations, supporting the development of coherent global and regional follow-up and indicators and in coordination, as appropriate, with other relevant mechanisms for sustainable development and climate change and updating the existing web-based Hyogo Framework for Action Monitor accordingly; participating actively in the work of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Indicators; generating evidence-based and practical guidance for implementation in close collaboration with States, and through mobilization of experts; reinforcing a culture of prevention in relevant stakeholders, through supporting development of standards by experts and technical organizations, advocacy initiatives, and dissemination of disaster risk information, policies and practices, as well as providing education and training on disaster risk reduction through affiliated organizations; supporting countries, including

global dan, secara tepat waktu menindaklanjuti proses di PBB, mendukung pengembangan yang koheren tindakan global dan regional - serta indikator dalam koordinasi, sesuai dengan mekanisme lain yang relevan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan perubahan iklim dan meng-*update* web yang ada sesuai dengan mekanisme monitoring yang berbasis Kerangka Aksi Hyogo; berpartisipasi aktif dalam pekerjaan antar agensi dan *Expert Group* terkait pembangunan yang berkelanjutan; menghasilkan bukti mendasar dan panduan praktis untuk implementasi dalam kerjasama dengan negara, dan melalui mobilisasi para ahli; memperkuat budaya pencegahan dengan pemangku kepentingan terkait, dengan mendukung pengembangan standar oleh para ahli dan organisasi teknis, inisiatif advokasi, dan penyebaran informasi risiko bencana, kebijakan dan praktek, serta memberikan pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana berafiliasi dengan banyak organisasi; negara-negara pendukung, melalui platform nasional atau yang setara dengan mereka, dalam perkembangan rencana nasional dan tren pemantauan

through the national platforms or their equivalent, in their development of national plans and monitor trends and patterns in disaster risk, loss and impacts; convening the Global Platform for Disaster Risk Reduction and supporting the organization of regional platforms for disaster risk reduction in cooperation with regional organizations; leading the revision of the United Nations Plan of Action on Disaster Risk Reduction for Resilience; facilitating the enhancement of, and continuing to service, the Scientific and Technical Advisory Group of the International Disaster Risk Conference in mobilizing science and technical work on disaster risk reduction; leading, in close coordination with States, the update of 2009 Terminology on Disaster Risk Reduction in line with the agreed terminology by States; and maintaining the stakeholders' commitment registry;

dan pola risiko, kerugian dan dampak bencana; adanya Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana dan mendukung platform regional untuk pengurangan risiko bencana bekerja sama dengan organisasi regional; memimpin revisi Rencana PBB Aksi Pengurangan Risiko Bencana untuk Ketangguhan; memfasilitasi peningkatan, dan layanan yang berlanjut, Konferensi Internasional para Ilmuran dan Kelompok Penasihat Teknis terkait Risiko Bencana dalam memobilisasi ilmu pengetahuan dan pekerjaan teknis tentang pengurangan risiko bencana; memunculkan, dalam koordinasi yang erat dengan negara, meng-*update* terminologi 2009 tentang Pengurangan Risiko Bencana yang disesuaikan dengan terminologi yang disepakati oleh Negara; dan menjaga komitmen pemangku kepentingan yang terdaftar;

(d) International financial institutions, such as the World Bank and regional development banks, to consider the priorities of this framework for

d) Lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Regional agar mempertimbangkan

providing financial support and loans for integrated disaster risk reduction to developing countries;

(e) Other international organizations and treaty bodies, including the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, international financial institutions at the global and regional levels, and the International Red Cross and the Red Crescent Movement to support developing countries, at their request, in the implementation of this framework, in coordination with other relevant frameworks;

(f) The United Nations Global Compact, as the main United Nations initiative for engagement with the private sector and business, to further engage with and promote the critical importance of disaster risk reduction for sustainable development and resilience;

(g). The overall capacity of the United Nations system to assist developing countries in disaster risk reduction should be strengthened by providing adequate resources through various funding mechanisms, including increased, timely, stable and

prioritas kerangka kerja ini untuk memberikan dukungan finasial dan pinjaman untuk penguranga risiko bencana yang terintegrasi bagi negara-negara berkembang;

e) Organisasi internasional lainnya dan badan perjanjian, termasuk Konferensi Para Pihak untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim, lembaga keuangan internasional di tingkat global dan regional, dan Palang Merah Internasional serta Gerakan Bulan Sabit Merah untuk mendukung negara-negara berkembang, atas permintaan mereka, dalam pelaksanaan kerangka kerja ini dan mengkoordinasikan dengan kerangka kerja lain yang relevan;

f) Global Compact - PBB, sebagai inisiatif utama PBB untuk keterlibatan sektor swasta dan bisnis agar lebih terlibat dan mempromosikan pentingnya pengurangan risiko bencana untuk pembanguna yang berkelanjutan dan ketangguhan;

g) Kapasitas keseluruhan sistem PBB untuk membantu negara-negara berkembang dalam pengurangan risiko bencana harus diperkuat dengan menyediakan sumber daya yang memadai melalui berbagai mekanisme pendanaan, termasuk

predictable contributions to the United Nations Trust Fund for Disaster Reduction, and by enhancing the role of the Fund in relation to the implementation of this framework.

(h) The Inter-Parliamentary Union and other relevant regional bodies and mechanisms for parliamentarians, as appropriate, to continue supporting, and advocating for, disaster risk reduction and the strengthening of national legal frameworks;

(i) The United Cities and Local Governments organization and other relevant bodies of local governments to continue supporting cooperation and mutual learning among local governments for disaster risk reduction and the implementation of this framework.

Follow-up actions

49. The Conference invites the General Assembly, at its seventieth session, to consider the possibility of including the review of the global progress in the implementation of this framework for disaster risk reduction as part of its integrated and coordinated follow-up processes to United Nations

peningkatan kontribusi yang tepat waktu, stabil dan dapat diprediksi bagi Trust Fund PBB untuk pengurangan bencana, dan dengan meningkatkan peran pendanaan sehubungan dengan pelaksanaan kerangka kerja ini;

h) Persatuan antar parlemen dan badan regional terkait lainnyadan mekanisme bagi para legislator untuk terus mendukung advokasi bagi pengurangan risiko bencana dan penguatan kerangka hukum nasional;

i) Persatuan Kota-kota dan Organisasi Pemerintahan Lokal serta badan-badan pemerintah daerah terkait lainnya untuk terus mendukung kerjasama dan saling belajar antar pemerintah daerah untuk pengurangan risiko bencana dan implementasi kerangka kerja ini;

Aksi Tindak Lanjut

49. Konferensi ini mengundang Majelis Umum pada sesi ketujuh, untuk mempertimbangkan kemungkinan termasuk peninjauan kemajuan global dalam pelaksanaan kerangka kerja ini untuk pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari proses tindak lanjut yang terintegrasi

conferences and summits, aligned with the Economic and Social Council, the High-level Political Forum for Sustainable Development and the quadriennial comprehensive policy review cycles, as appropriate, taking into account the contributions of the Global Platform for Disaster Risk Reduction and regional platforms for disaster risk reduction and the Hyogo Framework for Action Monitor.

50. The Conference recommends to the General Assembly the establishment at its sixty-ninth session of an open-ended intergovernmental working group, comprised of experts nominated by Member States, and supported by the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), with involvement of relevant stakeholders, for the development of a set of possible indicators to measure global progress in the implementation of this framework in conjunction with the work of the inter-agency expert group on sustainable development indicators. The conference also recommends that the Working Group considers the recommendations of the

dan terkoordinasi untuk konferensi PBB dan KTT, selaras dengan Dewan Ekonomi dan Sosial, Forum politik tingkat tinggi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan siklus tinjauan kebijakan empat tahunan yang komprehensif, dengan kontribusi yang tercatat dari platform global untuk pengurangan bencana dan platform regional untuk pengurangan risiko bencana serta memonitor Kerangka Aksi Hyogo.

50. Konferensi merekomendasikan kepada Majelis Umum pembentukan sesi enam sembilan sebuah kelompok kerja antar pemerintah yang terbuka, terdiri dari ahli yang dicalonkan oleh negara-negara anggota, dan di dukung oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR), dengan keterlibatan pemangku kepentingan terkait untuk pengembangan satu set indikator dalam mengukur kemajuan global terkait implementasi kerangka kerja ini dalam hubungannya dengan kelompok kerja ahli dalam indikator pembangunan yang berkelanjutan. Konferensi ini juga merekomendasikan bahwa Kelompok Kerja mempertimbangkan rekomendasi dari Para Ilmuwan dan *Technical Advisory Group* pada *update* tahun 2009 terminologi UNISDR tentang

Scientific and Technical Advisory Group on the update of the 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction by December 2016, and that the outcome of its work be submitted to the General Assembly for its consideration and adoption.

pengurangan Risiko Bencana pada bulan Desember 2016, kemudian hasil kerjanya diserahkan kepada Majelis Umun untuk dipertimbangkan dan diadopsi.

PLANAS PRB

Terjemahan Oleh: Platform Nasional PRB

© PRB - 2015